

**BATAS USIA DALAM PERKAWINAN (MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA 1984)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**INNEKE WAHYU AGUSTIN
13360038**

PEMBIMBING:

**DRS. ABD. HALIM, M.HUM
19630119 199003 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perkawinan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Faktor psikologis maupun fisiologis dari masing-masing mempelai dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangganya. Dengan demikian sangatlah perlu adanya pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, kajian-kajian pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Islam salah satunya membahas mengenai penentuan batas usia perkawinan. Indonesia mempunyai ketentuan mengenai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan di Malaysia khususnya di wilayah persekutuan menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Penelitian ini akan mengkaji letar belakang filosofis ditentukannya batas usia perkawinan dan metode yang digunakan dalam menentukan batas usia perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah datanya dari sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perbandingan yang di dalamnya mencakup pendekatan sejarah dan pendekatan filosofis. Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, dalam hal ini batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Dengan memperbandingkan sejarah latar belakang pembentukan perundang-undangan di kedua negara tersebut dapat mengetahui makna filosofis yang terkandung. Serta dapat menemukan metode apa yang digunakan dalam menentukan ketentuan hukum yang diberlakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu mendeskripsikan sejarah latar belakang filosofis dan metode pembentukan Undang-undang di Negara Indonesia dan Malaysia, kemudian menganalisis dengan memperbandingkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang filosofis penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan wilayah persekutuan Malaysia adalah sama-sama untuk meningkatkan derajat status perempuan dan untuk merespon perkembangan zaman. Pembatasan usia perkawinan ini dilakukan agar memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan menjaga keturunan dengan baik. Indonesia mempunyai masalah kependudukan, dengan pembatasan usia perkawinan bermaksud agar dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk. Berbeda dengan Malaysia, karena tidak mempunyai masalah kependudukan, Malaysia tidak mempunya maksud seperti halnya di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia menggunakan *re-intepretasi nash* dan *saddudz dzari'ah*. Metode *re-intepretasi nash* dilakukan dengan mengkaji ulang nash-nash yang telah ada dan menekankan pada maslahat umat, sedangkan *saddudz dzari'ah* digunakan karena dikhawatirkan timbulnya kemudharatan. Malaysia juga menggunakan metode *siyasah syar'iyyah* untuk menetapkan sanksi hukuman pada pelaku yang memaksa dan mencegah seseorang yang telah mencapai batas usia perkawinan untuk menikah. Berbeda dengan Indonesia yang tidak menggunakan metode *siyasah syar'iyyah* untuk mengatur aturan tersebut. Di Indonesia apabila perkawinan terjadi karena ancaman maka dapat dibatalkan atas permintaan suami istri.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Inneke Wahyu Agustin

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Inneke Wahyu Agustin

Nim : 13360038

Judul : Batas Usia dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Rajab 1438 H

25 April 2017

Pembimbing


Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP: 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-160/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : BATAS USIA DALAM PERKAWINAN (MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA 1984.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INNEKE WAHYU AGUSTIN
NIM : 13360038
Telah diujikan pada : Selasa, 9 Mei 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Pengaji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inneke Wahyu Agustin

NIM : 13360038

Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)" benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rajab 1438 H

3 April 2017

Penyusun



Inneke Wahyu Agustin
NIM. 13360038

MOTTO

“Waktu itu bagai pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(Hadits Riwayat Muslim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

Kedua Orang Tuaku Ibu Anik Rahayu & Bapak Taswi

Kedua Adikku Berlian & Sasa

Prodi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pecinta Kajian Perbandingan Hukum

khususnya bidang Perkawinan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَتَابَعُ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang telah diridhai oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyanpaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
5. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan arahannya kepada penyusun.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badruddin, selaku Staff TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Taswi dan Ibu Anik Rahayu, Adik-adik penyusun Berlian Dwi Nurqasanah dan Aulia Azizah Tsasabella. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyemangati dan mensupport penyusun hingga selesaiya studi S1 penyusun.
10. Segenap teman-teman PMH angkatan 2013 , kalian merupakan teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan indah selama menempuh studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Teman-teman tergokil, sebut saja (Ike) Nike Rosdiyanti orang yang tak kenal lelah menemani hari-hari penyusun, yang selalu sabar menghadapi sikap penyusun, tidak ada kata ungkapan lain untukmu you are the best friend. Septiana Sari (Embah) teman ngakak karena sikapnya yang kadang membuat kita heran karena sering lupa. Mafidatus Sa'adah (Mak.e) ini teman ngeselin kalau sudah lolanya kumat tapi paling ngangenin. Kenji Hartama (Big bos) trima kasih pada big bos yang senantiasa siap dipanggil untuk membantu mencari hadits, sang pencerah yang sangat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi. Irwan (Si Usil) teman terkonyol yang sangat usil dan donatur tawa yang tak henti-hentinya. Adham (I-am) julukannya adalah kritikus fashion, trimakasih telah menjadi komentator penampilan terbaik. Syahdan (Tukang Tidur), si rempong kalau mau nitip isi KRS atau nitip absen. Mereka adalah teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kelak kita semua akan sukses dengan caranya masing-masing. Amin...
12. Trimakash untuk Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah menjadikan penyusun menjadi pribadi yang lebih baik. Selain ilmu yang didapatkan, bersama PSKH penyusun mendapatkan sebuah kebersamaan dengan suasana kekeluargaan, rasa saling mengerti satu sama lain, rasa saling menghargai satu sama lain.

13. Trimakasih kepada teman-teman seperjuangan di PSKH Nike, Bang Jek, Noval, Yeni, Alif, Fida, Putri, Ana, Mbak Umi, Ilham, Ja'far, Amin, Agustin, Gendis, Ridwan, Iqbal dan lain-lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Mereka penyumbang tawa dalam setiap perjalanan kepengurusan PSKH. Tak lupa untuk para senior PSKH, sebut saja Mas Hendri, Mas Roy, Mas Riris, Mas Akbar, Mbak Rifa, Mas Azizi, Mbak Vina, Mas Emil, dan senior-senior lainnya terimakasih telah menjadi Inspirator terbaik di PSKH.

Yogyakarta, 6 Rajab 1438 H
3 April 2017
Penyusun

Inneke Wahyu Augustin
NIM: 13360038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | ša' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |

| | | | |
|----|--------|---|-----------|
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | El |
| م | min | m | Em |
| ن | nun | n | en |
| و | wawu | w | we |
| هـ | hā' | h | ha |
| ءـ | hamzah | , | aspostrof |
| يـ | ya' | y | ye |

A. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدةٌ | Ditulis | Muta‘addidah |
| عَدَّةٌ | Ditulis | ‘iddah |

B. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلْمٌ | Ditulis | ‘illah |

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءُ | Ditulis | Karāmah al-auliyā' |
|-------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāh al-fitri</i> |
|--------------------------|----------------|-----------------------|

C. Vokal Pendek

| | | | |
|------------------|--------|----------------|---------|
| — [○] — | fathah | Ditulis | a |
| فَعْلٌ | | Ditulis | Fa'ala |
| — [○] — | kasrah | Ditulis | i |
| ذُكْرٌ | | Ditulis | žukira |
| — [○] — | dammah | Ditulis | u |
| يَذْهَبُ | | Ditulis | Yazhabu |

D. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis Ditulis | ā Jāhiliyyah |
| 2 | Fathah + ya' mati يَسْعَى | Ditulis Ditulis | ā Yas'ā |
| 3 | Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ | Ditulis Ditulis | ī Karīm |
| 4 | Dammah + wawu mati فُرُوضٌ | Ditulis Ditulis | ū Furūd̄ |

E. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | Ditulis Ditulis | ai bainakum |
| 2 | Fathah + wawu mati قَوْلٌ | Ditulis Dutulis | au Qaul |

F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | a'antum |
| أَعْدَتْ | Ditulis | u'iddat |
| لَعِنْ شَكْرُمْ | Ditulis | la'in syakartum |

G. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآن | Ditulis | Al-Qur'ān |
| الْقِيَاسْ | Ditulis | Al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-sama' |
| الشَّمْسُ | Ditulis | asy-syams |

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|--------------------|---------|----------------|
| ذَوِي الْقُرْبَادْ | Ditulis | Žawī Al-furūdu |
| اَهْل السُّنَّة | Ditulis | Ahl as-sunnah |

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 9 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| E. Kerangka Teori | 13 |

| | |
|--|-----------|
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN | 23 |
| A. Pengertian Perkawinan..... | 23 |
| B. Pengertian Baligh..... | 28 |
| C. Batas Usia Perkawinan | 31 |
| BAB III BATAS USIA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA 1984 SURAT PERNYATAAN..... | 40 |
| A. Latar Belakang dan Metode Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia | 40 |
| 1. Sejarah Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia | 41 |
| 2. Metode Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia | 55 |
| B. Latar Belakang dan Metode Penetapan Batas Usia Perkawinan di Malaysia | 58 |
| 1. Sejarah Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia | 58 |
| 2. Metode Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia | 76 |
| BAB IV ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA..... | 81 |

| | |
|---|-----------|
| A. Analisis Terhadap Latar Belakang Filosofis Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan Wilayah Persekutuan Malaysia | 81 |
| B. Analisis Terhadap Metode Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan Wilayah Persekutuan Malaysia | 88 |
| BAB V PENUTUP..... | 95 |
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 97 |
| LAMPIRAN | |
| 1. Lampiran I Terjemahan Teks Arab | I |
| 2. Lampiran II Biografi Ulama dan Tokoh | II |
| 3. Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | IV |
| 4. Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 Malaysia | XIX |
| 5. Curiculum Vitae..... | LXVII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup lainnya, baik kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak mungkin untuk menginventarisir seluruhnya. Oleh Karena itu, kebutuhan-kebutuhan tersebut diklasifikasikan agar dapat dilihat secara menyeluruh. Di mana dalam mengklasifikasikan kebutuhan tersebut berdasarkan pada diri dan sifat hakikat manusia.¹

Dari sifat hakikat manusia dalam melakukan perkembangannya manusia pastilah memerlukan pasangan hidup untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan adalah suatu cara yang dilakukan umat manusia untuk membentuk suatu keluarga. Bagi manusia perkawinan merupakan hal penting, karena dengan perkawinan akan memperoleh keseimbangan hidup baik biologis, sosial maupun psikologis.

Perkawinan bukanlah semata-mata hanya memenuhi kebutuhan biologis, utamanya ialah pemenuhan manusia akan kebutuhan afektional², yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, serta di

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15.

²Syukron Zahidi, “Pengertian, Macam dan Fungsi Keluarga,” <http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-macam-dan-fungsi-keluarga.html?m=1>, akses 8 November 2016. Afektional merupakan sebuah fungsi dengan adanya hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dalam sebuah keluarga.

perhatikan. Demikian pula halnya dengan kebutuhan materi, bukanlah merupakan landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.³

Perkawinan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini.⁴

Pengertian perkawinan juga telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang keberadaannya diatur dan dilindungi oleh hukum, baik agama maupun negara. Hal ini menunjukkan betapa perkawinan bukan hanya ritual dan budaya semata, tetapi perkawinan ialah ikatan suci yang

³Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Dana bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 208. Karena apabila suatu perkawinan hanya didasarkan dengan ikatan fisik/biologis, maka dengan bertambahnya usia ikatan perkawinan itu akan rapuh. Demikian pula bila ikatan perkawinan itu hanya didasarkan pada materi, maka tidak akan menjamin kebahagiaan. Namun, jika didasari ada ikatan afektif, maka kebahagiaan dalam perkawinan akan relatif lebih kekal.

⁴ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm.13.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menyangkut kehidupan pasangan suami istri dan anak yang perlu dilindungi sehingga tujuan dan prinsip perkawinan sebenarnya bisa terwujud.⁶

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis maupun fisiologis. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.⁷

Faktor kesiapan mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis merupakan faktor yang menjadi syarat penting. Hal ini dikarenakan, calon pasangan suami istri tersebut akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja karena perbedaan dari keberagaman yang telah ada sebelumnya, tetapi juga perbedaan seputar kehidupan baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti perbedaan karakter, sifat, tempramen, orientasi atau tujuan dalam perkawinan, belum lagi perbedaan pola asuh yang dimiliki keduanya. Bila tidak memiliki kesiapan mental, maka dapat mempengaruhi perjalanan pernikahannya. Selain itu, kesiapan mental menjadi orang tua juga merupakan faktor penting bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah.⁸

Kematangan emosi adalah hal yang penting untuk perkawinan dimana akan membina sebuah rumah tangga. Dalam kehidupan manusia seharusnya perkawinan

⁶Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, cet. ke-1, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 61.

⁷ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan*, hlm. 14.

⁸ *Ibid.*

menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Akan tetapi tidak semua orang memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yaitu membina keluarga yang bahagia dalam berumah tangga.⁹ Dewasa ini sering terjadi kasus perceraian dalam rumah tangga karena diakibatkan oleh sifat emosional pasangan yang tidak terkontrol sehingga memicu terjadinya suatu perselisihan antara pasangan suami dan istri. Sifat emosional yang tidak terkontrol dapat terjadi dikarenakan oleh faktor usia. Sehingga, Batas usia dalam suatu perkawinan sangatlah penting karena usia juga mempengaruhi psikologis. Usia perkawinan yang tebilang masih muda dapat memicu adanya perceraian. Ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran dalam menjalani bahtera rumah tangga dan faktor emosional yang masih tinggi.

Sementara itu, perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu ialah yang sudah dewasa.¹⁰ Arti penting kedewasaan untuk dijadikan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum perlu dikaji secara mendalam sebab, sesungguhnya kedewasaan merupakan faktor penting untuk melanggengkan hubungan dalam perkawinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang

⁹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, hlm. 45.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 67.

didukung oleh selain bukti-bukti ilmiah, juga oleh argumentasi logis sehingga pada gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan.¹¹

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, kedewasaan sangat terkait dengan sikap bertanggung jawab. Dalam perspektif ilmu hukum, taraf kedewasaan itu dimaknai sebagai acuan yang dapat menyatakan bahwa seseorang telah cakap hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum. Undang-undang Perkawinan yang berlaku di suatu Negara menunjukkan kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk kawin/menikah dengan alasan bahwa perkawinan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab.¹²

Kedewasaan usia merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan melangsungkan akad pernikahan. Undang-undang telah menyebutkan secara jelas berapa batas usia minimum bagi pihak laki-laki ataupun perempuan. Di Negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”¹³

¹¹ Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia,” *Disertasi* Progam Doktor Bidang Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (2011), hlm. 3

¹² *Ibid.*, hlm. 1

¹³ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila terjadi pelanggaran pada pasal tersebut, maka ketentuannya dapat dikesampingkan dengan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”¹⁴

Maksudnya ketika kedua atau salah satu dari pasangan mempelai tidak memenuhi umur yang telah ditentukan maka untuk melangsungkan pernikahan haruslah mendapatkan izin dari Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Peraturan yang demikian yang disebut sebagai celah hukum, dimana ketentuan yang satu bisa diperengangkan oleh ketentuan yang lainnya.

Peraturan yang hampir sama juga terjadi di negara tetangga Malaysia yang merupakan Negara bagian. Semua negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri dalam bidang keluarga yang umum dikenal dengan sebutan enakmen atau statut (statuta dalam Bahasa Indonesia). Enakmen-enakmen dimaksud seperti:

1. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Kedah, 1979 (1964)
2. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Kelantan, 1983
3. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Malaka, 1983
4. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Negeri Sembilan, 1983.
5. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Wilayah Persekutuan, 1984.
6. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Slangor, 1984.
7. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Perak, 1984.

¹⁴ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Pulau Pinang, 1985.
9. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Terengganu, 1985.
10. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Pahang, 1987.
11. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Perlis (draft).
12. Enakmen undang-undang keluarga Islam, (Pindaan) Kelantan, 1985.
13. Enakmen undang-undang keluarga Islam, (Pindaan) Kelantan, 1987.
14. Enakmen undang-undang keluarga Islam, (Pindaan) Selangor, 1988.
15. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Johor, 1990.
16. Ordinan Keluarga Islam, Serawak, 1991.
17. Enakmen undang-undang keluarga Islam, Sabah.¹⁵

Melihat keadaan tersebut dapat diketahui bahwa Malaysia adalah negara federal, sampai sekarang belum mempunyai undang-undang keluarga yang berlaku secara nasional. Hukum-hukum keluarga yang diberlakukan berbeda-beda antara negeri bagian yang satu dengan negeri bagian yang lain. Usaha penyeragaman undang-undang hukum keluarga Islam pernah dilakukan, tetapi tidak semua mau menerima usaha penyeragaman.¹⁶

Menurut Khoiruddin Nasution setelah terjadinya pembaharuan Undang-undang Keluarga Malaysia apabila dikelompokkan terdapat dua kelompok besar:¹⁷

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 88.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi & Status Perempuan*

1. Undang-undang yang mengikuti Akta Persekutuan yaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah.
2. Kelantan, Johor, Malaka dan Kedah meskipun dicatat banyak persamannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 pasal.

Penulis disini akan mengambil Peraturan yang mengatur batas usia dalam perkawinan yang terdapat dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen 8 (Umur minimum untuk perkahwinan) [Akta A902] yang berbunyi:

Tiada sesuatu perkawinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.¹⁸

Peraturan mengenai batas minimum seseorang yang akan melangsungkan perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia untuk perempuan adalah 16 tahun. Tetapi, berbeda untuk laki-laki yaitu Indonesia 19 tahun dan wilayah persekutuan Malaysia 18 tahun serta, terdapat dispensasi untuk keadaan tertentu atas persetujuan lembaga pengadilan atau pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk membandingkan latar belakang ketentuan batas usia perkawinan secara filosofis dan

dalam *Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), hlm. 144.

¹⁸ Seksyen 8 Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.

metode apa yang digunakan dalam menetapkan ketentuan batas usia tersebut dari masing-masing Undang-undang di negara Indonesia dan Malaysia. Kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul “**BATAS USIA DALAM PERKAWINAN (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA 1984)**”.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang relevan untuk diangkat dan dijabarkan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah latar belakang filosofis penetapan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984?
2. Apakah metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia Perkawinan di kedua negara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan latar belakang filosofis penetapan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984.

- b. Untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam menetapkan batas usia Perkawinan di kedua negara tersebut.

B. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya dalam kajian batas usia perkawinan. Lebih dari itu untuk memberikan wawasan yang luas mengenai perbandingan suatu ketentuan hukum di negara Malaysia dan Indonesia.
- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini untuk menjadi informasi ilmiah dalam pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam pembaharuan hukum perkawinan dalam permasalahan batas usia karena masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di berbagai belahan dunia.

D. Telaah Pustaka

Studi penelitian yang membahas mengenai batas usia perkawinan dalam berbagai perspektif merupakan obyek kajian yang sudah lama bergulir di Indonesia bahkan di berbagai Negara. Masalah tersebut telah banyak dikaji oleh kalangan sarjana hukum, mulai dari tinjauan normatif hingga empiris. Namun dalam perbandingannya antara negara satu dengan yang lain, kajian mengenai batas usia dalam perkawinan masih relatif minim. Setidaknya adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, antara lain:

Buku “*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*”¹⁹, dalam buku ini menjelaskan definisi perkawinan secara menyeluruh dari sahnya suatu perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga akibat putusnya perkawinan yang dijabarkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum yang berlaku di Malaysia. Dari kedua sistem hukum tersebut di perbandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

Buku “*Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*”²⁰, di dalamnya membahas megenai perkembangan kontemporer hukum keluarga Islam beberapa negara di asia tenggara antara lain, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Di dalamnya membahas isu-isu yang berkembang dalam hukum keluarga Islam dan sejarah pengkodifikasiannya.

Skripsi oleh Firman yang berjudul “Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)”²¹, menjelaskan dengan melihat masing-masing konsep pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan

¹⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, cet. ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

²⁰ Sudirman Tebba (ed. dan pen.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1993).

²¹ Firman, “Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)”, *Skripsi* diajukan pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

yang ada di Indonesia dan Undang-undang keluarga muslim (Wilayah persekutuan) yang ada di Malaysia. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan dari ketentuan kedua negara tersebut untuk diperbandingkan.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Alex Fawzi dengan judul, “Batas Usia Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”²², dalam penelitian ini penulis melihat kemadharatan pernikahan anak-anak bagi kesehatan reproduksi dan tinjauan Hukum Islam terhadap usia ideal dalam perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Asyharul Ma’ala yang berjudul, “Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”²³. Dalam penelitian ini penyusun membandingkan antara pandangan Muhammadiyah dan NU tentang batas minimal usia nikah. Muhammadiyah lebih cenderung sepakat dengan ketentuan yang ada di UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan jelas bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam penetapan hukumnya, muhammadiyah mengkritisi hadits tentang usia Aisyah menikah karena

²² Moh. Alex Fawzi, " Batas Usia Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi", *Skripsi* diajukan pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²³ Asyharul Mu’ala, “Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *Skripsi* diajukan pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

terdapat perawi yang dipertanyakan daya ingatnya. Sedangkan NU, dalam metode istinbathnya selalu memakai pendapat ulama klasik. Sehingga Nu tidak memberikan batasan minimal usia menikah. Namun hal yang paling mendasar dalam persyaratan menikah ialah kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berkaitan .

Skrpsi yang disusun oleh Muh. Ainun Najib dengan judul, “Penetapan Usia Perkawinan (Analisis Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”²⁴ dalam skripsi ini penulis menjelaskan analisis penetapan usia perkawinan dengan melihat latar belakang serta landasan filosofis batas minimal usia nikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menggunakan teori Maqasid Syari’ah.

E. Kerangka Teoritik

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian karya ilmiah, karena teori hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dari segi tatanan hukum normative maupun empiris.²⁵ Meuwissen mengungkapkan bahwa tugas teori hukum untuk menerangkan dan menganalisis pengertian dari hukum dan berbagai konsep yang

²⁴ Muh. Ainun Najib, “Penetapan Usia Perkawinan (Analisis Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”, *Skrripsi* diajukan pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku kedua)*, cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

digunakan dalam hukum, seperti hukum subjektif, hukum obyektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, itikad baik dan sejenisnya.²⁶

Untuk menganalisis objek kajian batas usia dalam perkawinan menurut ketentuan Undang-undang di Indonesia dan Malaysia, penulis akan menggunakan teori perbandingan hukum. Secara sederhana perbandingan hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih²⁷ aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum. Perbandingan hukum mempunyai ruang lingkup yang luas dan meliputi seluruh bidang hukum. Dengan demikian, kerangka teoritis perbandingan hukum disini difokuskan dengan melihat dari aspek sejarah penetapan hukum, filosofinya, dan metode penemuan hukum dalam penetapan batas usia di negara Malaysia dan Indonesia, sehingga akan nampak persamaan dan perbedaannya.

Menurut Pollack dalam bukunya “*The History of Comparative Jurisprudence*” mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah “membantu menelusuri asal usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia”.²⁸ Dengan kata lain, perbandingan hukum membantu menelusuri berbagai sejarah konsepsi hukum yang ada di suatu negara.

²⁶ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, alih Bahasa B. Arief Shidarta, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 7.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum: Bahan PIH*, cet.ke-1, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 10.

²⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.329.

Sejarah menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan yang sekarang maupun keadaan yang akan datang. Apabila dihubungkan dengan hukum, maka hukum dewasa ini merupakan pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum sekarang.²⁹

Sejarah hukum mempelajari asal-usul peraturan hukum dalam masyarakat tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dari terbentuknya hukum yang sekarang ini berlaku di suatu masyarakat, sehingga dapat mengetahui arah dan tujuan mengapa hukum itu dibuat.³⁰ Berdasarkan hakikat historis/sejarah hukum tersebut dengan dibantu kajian filsafat, penelitian ini akan menjadi pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu peraturan perundangan terhadap masyarakat dengan menggali latar belakang keberadaan suatu hukum serta filosofisnya terhadap tujuan pemberlakuan aturan hukum tersebut.³¹

Filsafat sejatinya merupakan cara berfikir mendalam mengenai hakikat dari suatu kebenaran yang ada atau mungkin ada, sebagai wujud pencarian indikator kebenaran yang hakiki. Begitu pula dalam filsafat hukum islam, dimana filsafat hukum islam digunakan untuk menemukan berbagai macam tujuan hukum Islam yang sebenarnya

²⁹ *Ibid*, hlm.321.

³⁰ *Ibid*, hlm. 45

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet.ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 320-321.

dengan mengakaji berbagai aspek dari hukum Islam itu sendiri sehingga memperoleh kebenaran yang pasti.³²

Mustafa Abd al-Raziq, ahli fikih kontemporer Mesir misalnya, mengemukakan bahwa hakikat filsafat hukum Islam itu terdiri atas sumber hukum, kaidah, dan tujuannya. Dengan demikian, melihat kepada tujuan penerapan hukum Islam itulah beliau mengatakan ada ulama yang menamakan filsafat hukum Islam dengan maqashid al-tasyri, atau maqashid al-syari'ah yang merupakan tujuan atau rahasia yang sesungguhnya dibalik penetapan hukum Islam oleh Allah Swt.³³ Tujuan pokok pembuatan hukum menurut Al-Syathiby dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.³⁴ Dengan demikian maqashid dan maslahah menjadi istilah-istilah yang dapat dipertukarkan.³⁵

Kemaslahatan dilihat dari sisi syari'ah dibagi menjadi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara

³² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 50.

³³ Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 153.

³⁴ Abu Ishak al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), I: 3.

³⁵ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi*, alih bahasa Aksia Muhammad, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 244.

maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih kuat (lebih banyak), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.³⁶

Selain sejarah hukum yang berkaitan erat dengan kajian filsafat, dalam relasinya dengan teori perbandingan hukum juga dapat menelusuri metode penemuan hukum dalam peraturan ketentuan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang di kedua negara tersebut. Metode penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau apparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum digunakan sebagai sebuah reaksi terhadap sitasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam pengistilahan hukum yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum.³⁷ Dengan adanya metode penemuan hukum diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta hukum dan penyelesaiannya secara konkret yang dengan hal tersebut hukum dapat diterapkan.

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 28.

³⁷ Sudikno Metokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode sangat mutlak diperlukan untuk penyusunan suatu karya ilmiah agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih efektif dan optimal. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah datanya dari sumber kepustakaan seperti buku-buku yang mempunyai relevansi dengan batas usia perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan adalah Deskriptif-Analitik-Komparatif. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan latar belakang ketentuan batas usia yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah Persekutuan) Malaysia tahun 1984. Kemudian menganalisis secara filosofis dari latar belakang ketentuan kedua undang-undang tersebut. Sedangkan, Komparatif ialah membandingkan bagaimana makna ketentuan batas usia dalam perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah Persekutuan) Malaysia tahun 1984, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya guna memahami hakekat dari obyek yang diteliti.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*Comparative*) yang mencangkup di dalamnya pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*) dan Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).

- a. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum, isi dan bentuk sistem-sistem hukum itu saling diperbandingkan untuk menemukan dan memaparkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya dan kemungkinan arah perkembangannya.³⁸
- b. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka menjelajah sejarah. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu³⁹ Dengan pendekatan historis peneliti menggali makna dari pembentukan undang-undang dari kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 43.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.

c. Pendekatan filsafat dilakukan dengan mengupas isu hukum, dogma hukum, berdirinya suatu ketetapan hukum dalam penelitian normatif secara menyeluruh, mendasar, spekulatif dan mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Dengan demikian, dalam penjelajahan filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh kemampuan pengetahuan manusia.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Literatur-literatur dari pustaka dengan menggunakan bahan data sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984.

b. Bahan Sekunder

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 320.

Bahan data pendukung atau sekunder yang relevan dengan objek penelitian berupa buku, artikel, karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian yang lebih dulu lahir dan lain-lain.

5. Analisis Data⁴¹

Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif⁴² dengan metode analisis induktif dan komparatif.

- a. Analisis induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Analisis komparatif yaitu menganalisis suatu permaslahan dengan cara membandingkan obyek yang diteliti guna mencari pemecahan tentang hubungan kausal sebab-akibat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi, Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup. Adapun perincian dari sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan menghantarkan ke rumusan pokok pemasalahan, kemudian tujuan dan

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.*, hlm. 19. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

⁴² *Ibid.* Penelitian analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

kegunaan dari kepenulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pokok permaslahan yang akan menghantarkan penelitian ini ke pembahasan yang jauh lebih dalam

Bab kedua memuat mengenai gambaran umum batas usia dalam perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan meliputi definisi, rukun dan syarat, serta tujuan perkawinan, pengertian baligh, dan pemaparan batas usia perkawinan secara luas.

Bab ketiga memaparkan latar belakang penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Keluarga di Malaysia khususnya Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984 untuk mengetahui makna dan metode yang digunakan dalam penetapan batas usia perkawinan dikedua negara tersebut.

Bab keempat menganalisis secara filosofis penetapan batas usia dan metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga untuk penetapan di kedua negara tersebut. Kemudian, terakhir penyusun menjelaskan persamaan dan perbedaan sejarah dan Metode penetapan batas usia dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan. Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sesuai dengan pokok masalah yang diantaranya adalah:

1. Latar belakang penetapan batas usia perkawinan secara filosofis yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984 adalah sama-sama untuk meningkatkan derajat dan status perempuan dan untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, pembatasan usia perkawinan di lakukan agar memenuhi tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan menjaga keturunun dengan baik.
2. Metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia menggunakan metode *re-intepretasi nash* dengan mengkaji ulang nash-nash yang telah ada dan menekankan pada maslahat umat. Selain itu, kedua negara juga menggunakan metode *Saddudz Dzari'ah* dengan mengizinkan melaksanakan perkawinan bagi pelaku yang masih dibawah ketentuan batas usia perkawinan atas izin pengadilan atau pejabat yang berwenang. Malaysia juga menggunakan metode *Siyasah Syar'iyyah* dengan memberikan hukuman pada

pelaku yang memaksa dan mencegah seseorang yang telah mencapai batas usia perkawinan untuk menikah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan dan dengan hasil yang telah dipaparkan peneliti dapat memberikan saran, yaitu:

1. Untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih luas, jika penelitian ini menggunakan metode kepustakaan alangkah baiknya untuk selanjutnya agar dikembangkan dengan menggunakan metode lapangan. Dengan meninjau secara aplikatif akan menemukan hal-hal penyebab pentingnya pembatasan usia perkawinan. Di berbagai belahan dunia masih banyak terjadi perkawinan-perkawinan di bawah umur. Faktor yang menyebabkannya antara tingkatan ekonomi keluarga yang rendah ataupun terjadinya pergaulan bebas. Maka dari itu, pentingnya pembatasan usia perkawinan harus lebih sering digalakkan dan disosialisasikan terutama untuk para remaja.
2. Batas usia perkawinan ini alangkah lebih baiknya untuk ditingkatkan lagi khusunya untuk perempuan. karena resiko perempuan yaitu pada kesehatan rahimnya ketika ingin mempunyai anak. Karena umur 16 tahun itu masih terjadi penebalan dinding rahim sehingga resiko untuk mengandung lebih besar dan dampak yang diakibatkan bisa fatal yaitu terkenanya kanker serviks. Dengan demikian, seharusnya pemerintah ataupun tingkat kesadaran masyarakat sendiri lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2013.

2. Hadis

Abul Husein Ibnu Hajjāj al-Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī, 2004 M/ 1425 H.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka setia, 1999.

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ahmad, Amrullah dkk. (pen.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Eposito, Jhon L., *Woman in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1982.

Fathudin Alkalimasy, [Error! Hyperlink reference not valid.](#) "Hukum Keluarga Islam di Malaysia," akses 08 November 2016.

Fawzi, Moh. Alex, "Batas Usia Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi", *Skripsi* diajukan pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Firman, "Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)", *skripsi* diajukan pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Traiding, 1957.

- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gunawan, Wawan dan Evie Shofia Inayati (ed. dan pen.), *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhamadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhamadiyah dan Universitas Muhamadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, 2005.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hassan, Abdullah Alwi Haji, *The Administration of Islamic Law in Kelantan*, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1996.
- Koto, Alaiddin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi*, alih bahasa Ahsia Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mu'ala, Asyharul, "Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", *Skripsi* diajukan pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Najib, Muh. Ainun, "Penetapan Usia Perkawinan (Analisis Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.

- _____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurcholis, Moch., “Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 2:1, 2014.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Premada, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shuaib, Farid Sufian dkk, *Administration of Islamic Law in Malaysia Text and Material*, Malaysia: Lexis Nesis, 2010.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Syathiby, Abu Ishak al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Tebba, Sudriman (ed. dan pen.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Umar, Ahmad Syaidzit, "Studi Kritik Hadis-Hadis tentang Usia Pernikahan 'Aisyah r.a", *Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015.

Wahyuni, Sri, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim", dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Asy-Syir'ah*, Vol. 6:2, 2013.

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

4. Lain-lain

Abdullah, Abdul Rahman Haji, *Penjajahan Malaysia Cabaran dan Warisannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Alam, Andi Sjamsu, "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia," *Disertasi Progam Doktor Bidang Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2011.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Fang, Liaw Yock, *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kertamuda, Fatchiah E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Mangandaralam, Syahbuddin, *Mengenal dari Dekat Malaysia Negara Tetangga Kita dalam Asean*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, alih Bahasa B. Arief Shidarta, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Mulyo, Mufrod Teguh, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia dari Bias Gender Menuju Hukum yang Humanis*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Saleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- SJ, Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: UIN Maliki Press.
- Soedarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soewando, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontro Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Walgitto, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

“Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan,” http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37096218/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PENGENDALIAN_PERTUMBUHAN_PENDUDUK_MELALUI_PROGRAM_PENDEWASAAN_USIA_PERKAWINAN.docx, akses 14 April 2017

HM. Ghufron, “Makna Kedewasaan dalam Perkawinan (Analisis terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974).” http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35833053/MAKNA KEDE WASAAN DALAM PERKAWINAN_edit_jadi_jurnal.docx, akses 14 April 2017.

Muhammad Nasir, <http://makalahhukumislam lengkap.com/2013/12/batas-usia-perkawinan.html>, “Batas Usia Perkawinan,” akses 27 Maret 2017.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Syukron Zahidi, “Pengertian, Macam dan Fungsi Keluarga,” <http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-macam-dan-fungsi-keluarga.html?m=1>, akses 8 November 2016.

5. Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ARAB

| No. | Hlm | FN | Terjemahan |
|---------|-----|----|--|
| BAB II | | | |
| 1. | 32 | 20 | Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. |
| 2. | 33 | 22 | Dari Aisyah berkata: "Nabi Muhammad SAW menikahi aku ketika aku berumur enam tahun, dan mengumpuli aku ketika aku sebagai gadis yang telah berumur sembilan tahun." (Hadits Riwayat Muslim) |
| 3. | 33 | 23 | Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. |
| 4. | 34 | 24 | Wahai para pemuda siapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. (Hadits Riwayat Muslim) |
| BAB III | | | |
| 5. | 54 | 32 | Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sunguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yan berfikir. |
| 6. | 58 | 43 | Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yan lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara denan tutur kata yan benar. |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim yang dilahirkan pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai taun 218 Hijriah. Beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya untuk berguru. Imam Muslim Wafat pada minggu sore, dan dikebumikan di kampong Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur pada hari senin 25 Rajab 261 Hijriah/ 5 Mei 875 dalam usia 55 tahun.

BIOGRAFI TOKOH

Jhon Louis Esposito, atau yang biasa dikenal Jhon Eposito. Ia adalah Profesor kajian-kajian keislaman *Georgetown University*. Ia dikenal sebagai seorang pengamat Islam atau “Islamisis”. Eposito lahir pada 19 Mei 1940, di Brooklyn, New York City. Ia dikenal sebagai penulis yang sangat produktif sekaligus kritis dan telah melahirkan puluhan karya baik dalam bentuk buku maupun artikel.

Khoiruddin Nasution, lahir di Simangambat, Tapanuli selatan Sumatera Utara, 8 Oktober 1964. Beliau menempuh studi S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian mendapat beasiswa S2 di *McGill University Montreal* dan meneruskan studi S3 di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Beliau mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer di Fakultas Syariah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

Taufiqurrohman Syahuri, lahir di Desa Pebatan, Kecamatan Wanaseri, Kabupaten Brebes, Indonesia, 2 Mei 1960. Beliau adalah tokoh hukum tata negara yang menjadi anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015. Mendapatkan Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada 29 September 2003, dengan judul disertasi Proses Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain). Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial, ayah tiga putera ini tercatat sebagai dosen Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Sahid Jakarta. Selain itu pernah mengabdikan diri sebagai staf ahli di MK dan Watimpres.

Sudirman Tebba, lahir di Salomekko Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1984), ia melanjutkan ke *International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan *Distance Learning Institute* di Jakarta (2000). Kini ia menjadi Kepala Litbang Pemberitaan ANTV setelah sebelumnya menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) di Kompas (1983-1990), Harian Pelita (1990), dan ANTV (sejak 1993). Karya-karyanya mengalir deras, di antaranya: Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf, Syaikh Siti Jenar: Pengaruh Tasawuf al-Hallaj di Jawa, Tasawuf

Positif, Kecerdasan Sufistik, Orientasi Sufistik Cak Nur, Meditasi Sufistik, Ruh: Misteri Mahadahsyat, Nikmatnya Zikir & Doa, dan Hidup Bahagia Cara Sufi.

Liaw Yock Fang, lahir di Singapura 14 September 1936. Ia memperoleh gelar B.A. dan M.A. (tahun 1965) dalam bidang Bahasa dan Kesusasatraan Indonesia, di Universitas Indonesia. Kemudian tahun 1971 memperoleh gelar Drs. dari *University of Leiden*, dan tahun 1976 memperoleh gelar Doktor Sastra dari *University* yang sama, dengan mempertahankan disertasinya yang berjudul Undang-undang Melaka. Banyak karya-karyanya seperti buku-buku tentang Melayu, lebih dari 20 artikel diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur, dan lebih dari 20 makalah yang dipresentasikan di dalam seminar-seminar atau konfrensi-konfrensi yang diadakan di Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darusalam.





Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

- Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
- berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan

suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 5

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWAKILAN
Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
- Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
 - Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
- Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
R.I

SOEHARTO JENDERAL TNI.

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

Pendaftaran

Pendaftaran kes MAL bermula apabila ada permohonan daripada mana-mana pihak samada melalui saman beserta Penyataan Tuntutan atau permohonan beserta affidavit.

Di antara permohonan/saman di bawah Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 ialah

Nama Enakmen/ordinan/akta 303/1984

Suatu Akta bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan lain-lain perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga.

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

::SUSUNAN KES::
BAHAGIAN I (PERMULAAN)
Seksyen 1

Tajuk ringkas, pemakaian, dan mula berkuatkuasa.

- [Akta A828] (1) Akta ini boleh dinamakan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 dan terpakai hanya bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan
(2) Akta ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam *Warta*.

Di pinda oleh Akta A828 dan Akta A902

Pindaan Am: Dalam Akta ini, adalah dipinda dengan menggantikan perkataan "Hakim Syari'ah" di mana-mana juga istilah itu terdapat dalam Akta dengan perkataan "Hakim Syarie" [Akta A902].

Seksyen 2
Tafsiran.

- (1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang berlainan.
[Akta A902] "Akta Pentadbiran" ertiinya Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993;

"anak dara" ertiinya seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh, sama ada sudah berkahwin atau belum;

Akta A902] "baligh" ertiinya umur baligh mengikut Hukum Syaria';

"balu" ertiinya perempuan yang suaminya telah mati;

"bermastautin" ertinya tinggal tetap atau pada kelazimannya tinggal dalam sesuatu kawasan yang tertentu;

"darar syarie" ertinya bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran, akhlak atau hartabenda mengikut kebiasaan yang diakui oleh Hukum Syara';

"duda" ertinya lelaki yang isterinya telah mati;

[Akta A828] **"Enakmen Pentadbiran"** ertinya Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak 1952 bagi Negeri Selangor:

- (a) berhubungan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebagaimana yang

diubahsuaikan oleh Perintah-Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak) 1974, 1981 dan 1988 yang dibuat menurut seksyen 6 (4) Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 dan berkuatkuasa di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menurut kuasa seksyen 6 (1) Akta itu; dan

- (b) berhubungan dengan Wilayah Persekutuan Labuan, sebagaimana yang diubahsuaikan dan diperluaskan melalui Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pengubahsuaian dan Perluasan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak) 1985 yang dibuat menurut seksyen 7 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984;

"fasakh" ertinya pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syara' mengikut seksyen 52;

[Akta A902] **"Hakim Syarie"** atau **"Hakim"** ertinya Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dilantik di bawah seksyen 43(1) Akta Pentadbiran; [Akta A902] "Hukum Syara'" ertinya Undang-Undang Islam mengikut mana-mana Mazhab yang diiktiraf; "harta sepencarian" ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syara';

"janda" ertinya perempuan yang telah bernikah dan diceraikan setelah bersetubuh;

[Akta A902] **"kariah masjid"** berhubungan dengan sesuatu masjid, ertinya kawasan, sempadan yang ditetapkan di bawah seksyen 75 Akta Pentadbiran; "Ketua Pendaftar" ertinya seorang Ketua Pendaftar Perkahwinan, Penceraihan dan Ruju' Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28;

[Akta A902] **"Ketua Pendakwa Syarie"** ertinya pegawai yang dilantik di bawah seksyen 58(1) Akta Pentadbiran;

"Kitabiyah" ertinya-

- (a) seorang perempuan dari keturunan Bani Ya'qub; atau
- (b) seorang perempuan Nasrani dari keturunan orang-orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul; atau
- (c) seorang perempuan Yahudi dari keturunan orang-orang Yahudi sebelum Nabi 'Isa menjadi Rasul;

[Akta A902] "**Mahkamah**" atau "**Mahkamah Syariah**" ertinya Mahkamah Rendah Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah yang ditubuhkan di bawah seksyen 40 Akta Pentadbiran;

[Akta A902] "**Mahkamah Rayuan Syariah**" ertinya Mahkamah Rayuan Syariah yang ditubuhkan di bawah seksyen 40(3) Akta Pentadbiran;

[Akta A902] "**Majlis**" ertinya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang ditubuhkan di bawah seksyen 4 Akta Pentadbiran;

"mas kahwin" ertinya pembayaran kahwin yang wajib dibayar di bawah Hukum Syara' oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang, menurut Hukum Syara', dapat dinilai dengan wang;

"mut'ah" ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syara' kepada isteri yang diceraikan;

"nasab" ertinya keturunan yang berdasarkan pertalian darah yang sah;

[Akta A902] "**Peguam Syarie**" ertinya orang yang diterima di bawah seksyen 59 Akta Pentadbiran sebagai Peguam Syarie; [Akta A902] "pemberian" ertinya pemberian sama ada dalam bentuk wang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan;

[Akta A902] "**Pendaftar**" ertinya Pendaftar Kanan Perkahwinan, Penceraihan, dan Ruju' Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28, dan termasuk Pendaftar dan Penolong Pendaftar;

"persetubuhan syubhah" ertinya persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad nikah akan tetapi sebenarnya akad itu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum Had dalam Islam;

"ruju' " ertinya perkembalian kepada nikah yang asal;

"sesusuan" ertinya penyusuan bayi dengan perempuan yang bukan ibu kandungnya sekurang-kurangnya sebanyak lima kali yang mengenyangkan dalam masa umurnya dua tahun ke bawah;

"ta'liq" ertinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut Hukum Syara' dan peruntukan Akta ini;

"tak sahtaraf", berhubungan dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah;

"tarikh yang ditetapkan" ertinya tarikh yang ditetapkan di bawah seksyen 1 (2) untuk mula berkuatkuasanya Akta ini;

"thayyib" ertinya perempuan yang pernah bersetubuh;

[Akta A902] "**wali Mujbir**" ertinya bapa atau datuk sebelah bapa dan ke atas;

[Akta A828] "**wali Raja**" ertinya wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, dalam hal Wilayah-Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau oleh Raja, dalam hal sesuatu Negeri lain, untuk mengahwinkan perempuan tidak mempunyai wali dari nasab;

[Akta A828] "**"Wilayah Persekutuan"** ertinya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau Labuan, mengikut mana yang dikehendaki;

[Akta A828] "**"Wilayah-Wilayah Persekutuan"** ertinya Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.

- (2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Akta ini dan yang tidak ditakrifkan dalamnya tetapi ditakrifkan dalam Akta Tafsiran 1967 hendaklah mempunyai erti yang diberi kepadanya masing-masing oleh Akta itu.
- (3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau pentafsiran perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Akta ini yang disenaraikan dalam Jadual, rujukan bolehlah dibuat kepada bentuk skrip bahasa Arab bagi perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan itu yang ditunjukkan bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.
- (4) Yang di-Pertuan Agong boleh dari semasa ke semasa meminda, memotong daripada, atau menambah kepada, Jadual itu

Seksyen 3
Kecualian prerogatif.

[Akta A828] Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak prerogatif dan kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua agama Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan, sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Seksyen 4
Pemakaian

Kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata selainnya, Akta ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Wilayah Persekutuan dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan tetapi tinggal di luar Wilayah Persekutuan

Seksyen 5
Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.

Jika bagi maksud-maksud Akta ini timbul apa-apa soal tentang sama ada seseorang itu orang Islam, soal itu hendaklah diputuskan mengikut kriteria reputasi am, tanpa membuat apa-apa percubaan untuk mempersoalkan keimanan, kepercayaan, kelakuan, perangai, watak, perbuatan, atau kemungkiran orang itu.

Seksyen 6

Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Akta ini.

- (1) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh sahnya sesuatu perkahwinan Islam yang telah diakadnikahkan di bawah mana-mana jua undang-undang di mana-mana jua pun sebelum tarikh yang ditetapkan.

- (2) Perkahwinan sedemikian, jika sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia telah diakadnikahkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini.
- (3) Tiap-tiap perkahwinan sedemikian, melainkan jika tidak diakui di bawah undang-undang yang di bawahnya ianya telah diakadnikahkan, hendaklah berterusan sehingga dibubarkan-
 - (a) dengan kematian salah seorang daripada pihak-pihak yang berkahwin itu;
 - (b) dengan apa-apa talaq sebagaimana yang dilafazkan di bawah Akta ini;
 - (c) dengan perintah Mahkamah yang layak berbidangkuasa; atau
 - (d) dengan penetapan pembatalan yang dibuat oleh Mahkamah yang layak berbidangkuasa.

BAHAGIAN II (PERKAHWINAN)

Seksyen 7

Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan

- (1) Sesuatu perkahwinan di Wilayah Persekutuan hendaklah mengikut peruntukan Akta ini danhendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syara' oleh-
 - (a) wali di hadapan Pendaftar;
 - (b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
 - (c) Pendaftar sebagai wakil wali.
- (2) Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syara', perkahwinan itu hendaklah diakad nikahkan hanya oleh wali

Seksyen 8

Umur minimum untuk perkahwinan.

[Akta A902] Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.

Seksyen 9

Pertalian yang melarang perkahwinan.

- (1) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab nasab, berkahwin dengan-
 - (a) ibunya atau bapanya;
 - (b) neneknya hingga ke atas sama ada dari sebelah bapa atau dari sebelah ibu;
 - (c) anak peremuannya atau anak lelakinya dan cucu peremuannya atau cucu lelakinya hingga ke bawah;
 - (d) saudara perempuan atau saudara lelaki seibu seapa, saudara perempuan atau saudara lelaki seapa, dan saudara perempuan atau saudara lelaki seibu;
 - (e) anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki atau saudara perempuan hingga ke bawah;
 - (f) emak saudara atau bapa saudara sebelah bapanya hingga ke atas;
 - (g) emak saudara atau bapa saudara sebelah ibunya hingga ke atas.

- (2) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab pertalian kahwin, berkahwin dengan-
- ibu mertuanya atau bapa mertuanya hingga ke atas;
 - emak tirinya atau bapa tirinya, iaitu isteri bapanya atau suami ibunya;
 - neneh tirinya, iaitu isteri atau suami kepada neneh lelakinya, atau neneh perempuannya, sama ada dari sebelah bapa atau sebelah ibu;
 - menantunya;

[Akta A902] (e) anak perempuan atau anak lelaki tirinya hingga ke bawah daripada isteri atau suami yang perkahwinan itu telah disatukan.

- (3) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab sesusan, berkahwin dengan seseorang perempuan atau lelaki yang ada hubungan dengannya melalui penyusuan di mana, jika hubungan itu adalah melalui kelahiran dan bukan melalui penyusuan, perempuan atau lelaki itu tetap dilarang berkahwin dengannya oleh sebab nasab atau pertalian kahwin.
- (4) Tiada seseorang lelaki boleh mempunyai dua isteri pada satu masa jika isteri-isteri itu adalah bertalian antara satu sama lain melalui nasab, pertalian kahwin, atau susuan dan pertalian itu adalah dari jenis yang, jika salah seorang daripada mereka adalah seorang lelaki, menjadikan perkahwinan antara mereka tetap tidak sah di sisi Hukum Syara'

Seksyen 10
Orang-orang dari agama lain

- (1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah
- (2) Tiada seseorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.

Seksyen 11
Perkahwinan tak sah.

Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara', untuk menjadikannya sah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN CALIKA
ARTA
Seksyen 12
Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan

- [Akta A902] (1) Sesuatu perkahwinan yang bersalah dengan Akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini.
- (2) Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjelaskan seksyen 40(2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara' boleh didaftarkan di bawah Akta ini dengan perintah daripada Mahkamah.

Seksyen 13
Persetujuan dikehendaki.

Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada-

- (a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut Hukum Syara'; atau

[Akta A902] (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu oleh wali Raja mengikut Hukum Syara'; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara' atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.

Seksyen 14 Perkahwinan seseorang perempuan

- (1) Tiada seseorang perempuan boleh, dalam masa perkahwinannya dengan seorang lelaki berterusan, berkahwin dengan seseorang lelaki lain.
- (2) Jika perempuan itu adalah seorang janda-
 - (a) tertakluk kepada perenggan (c), dia tidak boleh, pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh 'iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara', berkahwin dengan seseorang melainkan kepada lelaki yang akhir dia telah bercerai;
 - (b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan-
 - (i) suatu surat perakuan cerai yang sah yang dikeluarkan di bawah undang-undang yang pada masa itu berkuatkuasa; atau
 - (ii) suatu salinan yang diperakui bagi catatan yang berkaitan dengan perceraianya dalam daftar perceraian yang berkenaan; atau
 - (iii) suatu perakuan, yang boleh diberi atas permohonannya selepas penyiasatan yang wajar oleh Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana permohonan itu dibuat, yang bermaksud bahawa dia adalah seorang janda;
 - (c) jika perceraian itu adalah dengan ba-in kubra, iaitu tiga talaq, dia tidak boleh berkahwin semula dengan suaminya yang dahulu itu melainkan dia telah berkahwin dengan sah dengan seorang lain dan dia telah disetubuhi oleh seorang lain itu dalam perkahwinan itu dan perkahwinan itu dibubarkan kemudiannya dengan sah dan setelah habis 'iddahnya.
- (3) Jika perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum dia telah disetubuhi oleh suaminya dalam perkahwinan itu, dia tidak boleh, dalam masa 'iddah perceraian biasa, berkahwin dengan seseorang yang lain daripada suaminya yang dahulu itu, kecuali dengan kebenaran Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa di tempat pengantin perempuan itu bermastautin.
- (4) Jika perempuan itu adalah seorang balu-
 - (a) dia tidak boleh berkahwin dengan seseorang pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh 'iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara':

- (b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan surat perakuan kematian suaminya atau dengan cara lain membuktikan kematian suaminya

Seksyen 15
Pertunangan.

[Akta A902] Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum Syara', sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah.

(PERMULAAN KEPADA PERKAHWINAN)

Seksyen 16
Permohonan untuk kebenaran berkahwin

- (1) Apabila dikehendaki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan, tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin.
- (2) Jika pihak lelaki bermastautin di kariah masjid yang berlainan dari kariah masjid pihak perempuan, atau bermastautin di mana-mana Negeri, permohonannya hendaklah mengandungi atau disertai dengan kenyataan Pendaftar bagi kariah masjidnya atau oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu, mengikut mana yang berkenaan, yang bermaksud bahawa sejauh yang dapat dipastikannya perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu adalah benar.
- (3) Permohonan tiap-tiap satu pihak hendaklah disampaikan kepada Pendaftar sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh yang dicadangkan bagi perkahwinan itu, tetapi Pendaftar boleh membenarkan masa yang lebih singkat dalam mana-mana kes tertentu.
- (4) Permohonan kedua-dua pihak hendaklah dianggap sebagai suatu permohonan bersama.

Seksyen 17
Mengeluarkan kebenaran berkahwin

Tertakluk kepada seksyen 18, Pendaftar, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu, tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu, dan, jika pihak lelaki itu sudah berkahwin, bahawa kebenaran yang dikehendaki oleh seksyen 23 telah diberi, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dan setelah dibayar fee yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.

Seksyen 18
Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie

- (1) Dalam mana-mana kes berikut, iaitu-
- (a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8; atau
 - (b) jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh seksyen 14 (3); atau
 - (c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara',

Maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujukkan permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa di tempat perempuan itu bermastautin.

- (2) Hakim Syarie, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 14 (3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Raja bagi maksud-maksud seksyen 13 (b), mengikut mana yang berkenaan, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya dan setelah dibayar fee yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk perkahwin dalam borang yang ditetapkan.

Seksyen 19

Kebenaran perlu sebelum akadnikah.

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran perkahwin telah diberi:

- (a) oleh Pendaftar di bawah seksyen 17 atau oleh Hakim Syarie di bawah seksyen 18, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan; atau
- (b) oleh pihak berkuasa yang hak bagi sesuatu Negeri, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin di Negeri itu.

Seksyen 20

Tempat perkahwinan.

- (1) Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan kecuali dalam kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin, tetapi Pendaftar atau Hakim Syarie yang memberi kebenaran perkahwinan di bawah seksyen 17 atau 18 boleh memberi kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan di tempat lain, sama ada dalam Wilayah Persekutuan atau dalam mana-mana Negeri.
- (2) Kebenaran di bawah subseksyen (1) bolehlah dinyatakan dalam kebenaran perkahwinan yang diberi di bawah seksyen 17 atau 18.
- (3) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1), sesuatu perkahwinan itu bolehlah diakadnikahkan dalam kariah masjid yang lain daripada kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin jika-

- (a) dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam Wilayah Persekutuan, kebenaran berkahwin mengenai perkahwinan itu telah diberi di bawah seksyen 17 atau 18 dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kariah masjid yang lain itu telah diberi di bawah subseksyen (1); atau
- (b) dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam sesuatu Negeri, kebenaran berkahwin mengenai perkahwinan itu dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kariah masjid yang lain itu telah diberi oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu.

Seksyen 21

Mas kahwin dan pemberian

- (1) Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.
- (2) Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan-
 - (a) nilai dan butir-butir lain mas kahwin;
 - (b) nilai dan butir-butir lain pemberian;
 - (c) nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akadnikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan
 - (d) butir-butir cagaran yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.

Seksyen 22

Catatan dalam Daftar Perkahwinan

- (1) Selepas sahaja akadnikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau taliq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan.
- (2) Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan oleh dua orang saksi, selain daripada Pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakadnikahkan.
- (3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh Pendaftar itu.

Seksyen 23

Poligami.

[Akta A902]

- (1) Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan, boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain atau perkahwinan yang dikontrakkan tanpa kebenaran sedemikian boleh didaftarkan di bawah Akta ini:

Dengan syarat Mahkamah boleh jika ia ditunjukkan bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syara', memerintahkan perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123.

- (2) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Wilayah Persekutuan dan perkahwinan di luar Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan

- (3) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.
- (4) Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati-
- (a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila dipihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;
 - (b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syara', semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;
 - (c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syara'; dan
 - (d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.
- (5) Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (3) dan akuan berkanun yang dikehendaki oleh subsekysen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri yang sedia ada.
- (6) Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan dalam Enakmen Pentadbiran bagi rayuan dalam perkara sivil.
- (7) Seseorang yang berkahwin bersalah dengan subseksyen (1) hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

- (8) Acara bagi akadnikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Wilayah Persekutuan di bawah Akta ini.

Seksyen 24

Akadnikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri

- (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), perkahwinan boleh diakadnikahkan mengikut Hukum Syara' oleh Pendaftar yang dilantik di bawah seksyen 28 (3) di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di mana-mana negara yang telah tidak memberitahu Kerajaan Malaysia tentang bantahannya terhadap pengakadnikahan perkahwinan di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul itu.
- (2) Sebelum mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini, Pendaftar hendaklah berpuas hati-
 - (a) bahawa satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu adalah pemastautin Wilayah Persekutuan;
 - (b) bahawa tiap-tiap satu pihak mempunyai keupayaan untuk berkahwin mengikut Hukum Syara' dan Akta ini; dan
 - (c) bahawa, jika salah satu pihak bukan pemastautin Wilayah Persekutuan, perkahwinan yang dicadangkan itu, jika diakadnikahkan, akan dikira sebagai sah di tempat di mana pihak itu bermastautin.
- (3) Acara bagi akadnikah dan pendaftaran perkahwinan di bawah seksyen ini hendaklah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan - perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Wilayah Persekutuan di bawah Akta ini seolah-olah Pendaftar yang dilantik untuk sesuatu negara asing adalah seorang Pendaftar untuk Wilayah Persekutuan.

BAHAGIAN III (PENDAFTARAN PERKAHWINAN)

Seksyen 25

Pendaftaran

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Wilayah Persekutuan hendaklah didaftarkan mengikut Akta ini.

Seksyen 26

Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq

- (1) Selepas mendaftarkan sesuatu perkahwinan dan selepas dibayar kepadanya fee yang ditetapkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu surat perakuan nikah dalam borang yang ditetapkan kepada kedua-dua pihak bagi perkahwinan itu.
- (2) Pendaftar hendaklah juga, selepas dibayar fee yang ditetapkan, mengeluarkan suatu surat perakuan ta'liq dalam borang yang ditetapkan kepada tiap-tiap satu pihak bagi perkahwinan itu.

Seksyen 27
Melaporkan perkahwinan yang taksah atau tak legal.

Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap orang untuk melaporkan kepada Pendaftar tentang hal keadaan sesuatu kes dalam mana dia berpendapat bahawa sesuatu perkahwinan adalah taksah atau bahawa sesuatu perkahwinan yang kena didaftarkan telah diakadnikahkan bersalahan dengan Akta ini.

Seksyen 28
Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan, dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam.

- (1) Yang di-Pertuan Agong boleh melantik mana-mana pegawai awam yang berkelayakan untuk menjadi Ketua Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam bagi maksud-maksud Akta ini, yang mana adalah berkuasa menjalankan penyeliaan dan kawalan ke atas Pendaftar-Pendaftar dan pendaftaran perkahwinan, perceraian, dan ruju' di bawah Akta ini.
- [Akta A902] (2) Yang di-Pertuan Agong boleh melantik beberapa orang yang berkelayakan sebagaimana perlu, untuk menjadi Pendaftar Kanan, Pendaftar, atau Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam bagi mana-mana kariah masjid dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan sebagaimana ditentukan dalam perlantikan itu.
- (3) Yang di-Pertuan Agong boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, melantik mana-mana anggota staf diplomatik Malaysia di mana-mana negara untuk menjadi Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam bagi maksud-maksud Akta ini di negara itu.
- (4) Tiap-tiap orang yang dilantik di bawah subseksyen (1) yang bukan pegawai awam hendaklah disifatkan sebagai pegawai awam bagi maksud-maksud Kanun Keseksaan.

Seksyen 29
Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan

Tiap-tiap Pendaftar hendaklah menyimpan suatu Daftar Perkahwinan dan buku-buku sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta ini atau oleh kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta ini, dan tiap-tiap perkahwinan yang diakadnikahkan dalam Wilayah Persekutuan hendaklah didaftarkan dengan sewajarnya oleh Pendaftar dalam Daftar Perkahwinannya.

Seksyen 30
Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar

- (1) Tiap-tiap Pendaftar hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik selepas akhir tiap-tiap satu bulan, menyerahkan kepada Ketua Pendaftar suatu salinan tiap-tiap catatan yang diperakui benar dan ditandatangani olehnya yang telah dibuat dalam Daftar Perkahwinan.

- (2) Semua salinan itu hendaklah disimpan oleh Ketua Pendaftar mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan dan hendaklah menjadi Daftar Perkahwinan Ketua Pendaftar.

Seksyen 31

Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.

- (3) Jika seseorang yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan telah berkahwin di luar negeri dengan sah mengikut Hukum Syara', bukannya satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 24, maka orang itu hendaklah, dalam masa enam bulan selepas tarikh perkahwinan itu, hadir di hadapan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat dengan paling senang di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu, setelah didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini.
- (4) Jika sebelum tamat tempoh enam bulan itu salah satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu dijangkakan akan kembali ke Wilayah Persekutuan dan perkahwinan itu belum didaftarkan di luar negeri, maka pendaftaran perkahwinan itu hendaklah dibuat dalam masa enam bulan selepas salah satu atau kedua-dua pihak itu mula-mula sampai di Wilayah Persekutuan dengan cara pihak itu atau kedua-dua pihak itu hadir di hadapan mana-mana Pendaftar dalam Wilayah Persekutuan dan :-
- (a) mengemukakan kepada Pendaftar itu surat perakuan nikah atau apa-apa keterangan, sama ada lisan atau dokumentar, yang boleh memuaskan hati Pendaftar bahawa perkahwinan itu telah berlaku;
 - (b) memberi apa-apa butir sebagaimana yang dikehendaki oleh Pendaftar untuk pendaftaran sewajarnya perkahwinan itu; dan
 - (c) memohon dalam borang yang ditetapkan supaya perkahwinan itu didaftarkan dan menandatangani akuan di dalamnya.
- (3) Pendaftar boleh mengecualikan satu daripada pihak-pihak itu daripada hadir jika dia berpuas hati bahawa ada sebab-sebab yang baik dan cukup bagi pihak itu tidak hadir dan dalam hal yang demikian catatan dalam Daftar Perkahwinan hendaklah termasuk suatu pernyataan tentang sebab pihak itu tidak hadir.
- (4) Selepas sahaja pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini, satu salinan sah catatan dalam Daftar Perkahwinan yang diperakui dan ditandatangani oleh Pendaftar hendaklah diserahkan atau dihantar kepada suami dan satu salinan lagi kepada isteri, dan satu lagi salinan sah yang diperakui hendaklah dihantar, dalam tempoh sebagaimana yang ditetapkan, kepada Ketua Pendaftar yang hendaklah menyebabkan semua salinan-salinan yang diperakui itu dijilid bersama untuk menjadi Daftar Perkahwinan Orang Islam Luar Negeri.
- (5) Jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan yang dikehendaki didaftarkan di bawah seksyen ini tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam tempoh yang dinyatakan dalam subseksyen (1), perkahwinan itu boleh, atas permohonan kepada Pendaftar, didaftarkan kemudian setelah dibayar apa-apa penalti yang ditetapkan.

Seksyen 32

Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.

Tiada seseorang, lain daripada mereka yang dilantik di bawah seksyen 28, boleh-

- (a) menyimpan apa-apa buku yang mana adalah atau yang berupa sebagai suatu daftar yang disimpan mengikut Akta ini; atau
- (b) mengeluarkan kepada seseorang apa-apa dokumen yang mana adalah atau yang berupa sebagai suatu salinan surat perakuan bagi perkahwinan atau perakuan perkahwinan yang didaftarkan oleh Pendaftar.

Seksyen 33

Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.

- (1) Walau apa pun peruntukan seksyen 6 dan seksyen 31, pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan mengikut Hukum Syara' yang diakadnikahkan di bawah mana-mana undang-undang sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan boleh, jika perkahwinan itu belum didaftarkan, memohon pada bila-bila masa kepada Pendaftar dalam borang yang ditetapkan untuk didaftarkan perkahwinan itu.
- (2) Pendaftar boleh menghendaki pihak-pihak kepada perkahwinan itu hadir di hadapannya dan mengemukakan apa-apa keterangan yang dikehendakinya mengenai perkahwinan itu, sama ada lisan atau dokumentar, dan memberi apa-apa butir lain sebagaimana yang dikehendakinya olehnya.
- (3) Pendaftar boleh, setelah puas hati tentang kebenaran pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam permohonan itu, mendaftarkan perkahwinan itu dengan mencatatkan butir-butir mengenainya dalam Daftar Perkahwinan yang ditetapkan bagi maksud ini.
- (4) Catatan perkahwinan dalam Daftar Perkahwinan itu hendaklah ditandatangani oleh Pendaftar yang membuat catatan itu dan oleh kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu, jika dapat hadir, jika tidak, oleh mana-mana satu pihak yang hadir di hadapan Pendaftar.
- (5) Selepas perkahwinan itu didaftarkan, satu salinan catatan dalam Daftar Perkahwinan yang diperakui dan ditandatangani oleh Pendaftar dan dimeterai dengan meterai jawatannya hendaklah diserahkan atau dihantar kepada suami dan satu salinan lagi kepada isteri dan satu salinan ketiga hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
- (6) Pendaftar tidak boleh mendaftarkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini jika dia berpuas hati bahawa perkahwinan itu adalah tidak diakui di bawah Akta ini.

Seksyen 34

Efek pendaftaran di sisi undang-undang

Tiada apa-apa jua dalam Akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan diakui atau tidak diakui sesuatu perkahwinan semata-mata oleh sebab ianya telah didaftarkan atau tidak didaftarkan, yang mana, sebaliknya, adalah tidak diakui atau diakui.

BAHAGIAN IV

(PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN
AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN)

Seksyen 35

Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 36

Pelanggaran terhadap seksyen 32.

Seseorang yang melanggar seksyen 32 adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu; dan bagi kesalahan kali kedua atau yang kemudiannya hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 37

Gangguan terhadap perkahwinan.

Kecuali jika dibenarkan oleh Hukum Syara', seseorang yang menggunakan apa-apa kekerasan atau ugutan-

- (a) untuk memaksa seseorang berkahwin bertentangan dengan kemahuannya; atau
- (b) untuk menahan seseorang lelaki yang telah mencapai umur lapan belas tahun atau seseorang perempuan yang telah mencapai umur enam belas tahun dari berkahwin dengan sahnya,

adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 38

Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.

Jika seseorang, bagi maksud mendapatkan suatu perkahwinan dilakukan di bawah Akta ini, sengaja membuat sesuatu akuan atau pernyataan yang palsu, maka orang itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 39

Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.

Seseorang yang mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan manakala dia tidak diberi kuasa di bawah Akta ini, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 40

Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akadnikah perkahwinan.

(1) Seseorang yang dengan diketahuinya mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakadnikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkahwinan:-

- (a) tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana dikehendaki oleh seksyen 19; atau
- (b) di hadapan selain dari di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh dipercayai di samping orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu,

adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

(2) Seseorang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akadnikah atau yang menjalani sesuatu cara akadnikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 41

Kebenaran untuk mendakwa.

[Akta A902] Tiada apa-apa dakwaan atas sesuatu kesalahan di bawah seksyen 35 hingga 40 boleh dibawa kecuali dengan kebenaran bertulis dari Ketua Pendakwa Syarie.

Seksyen 42

Membetulkan kesilapan.

(1) Jika Pendaftar berpuas hati melalui akuan berkanun atau selainnya bahawa sesuatu catatan berhubungan dengan sesuatu perkahwinan adalah silap pada bentuk atau isinya, dia boleh, di hadapan orang-orang yang bernikah itu, atau, jika mereka tidak ada, di hadapan dua orang saksi yang boleh dipercayai, membetulkan kesilapan itu dengan memotong catatan itu dan membuat catatan yang betul dan dia hendaklah selepas itu mengarahkan supaya catatan dalam Daftar Perkahwinan tempatan dibetulkan mengikut cara yang sama.

(2) Pendaftar hendaklah menandatangani dan mentarikhkan pembetulan yang dibuat dalam surat perakuan nikah itu dan dalam Daftar Perkahwinan tempatan itu.

(3) Tiap-tiap catatan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah diakusaksi oleh saksi-saksi yang dihadapannya catatan itu telah dibuat.

(4) Suatu salinan pembetulan itu yang diperakui hendaklah dihantar dengan segera kepada Ketua Pendaftar supaya suatu pembetulan yang serupa dibuat dalam Daftar Perkahwinannya.

Seksyen 43

Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.

(1) Tiap-tiap Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan yang disimpan oleh Ketua Pendaftar atau Pendaftar di bawah Akta ini hendaklah terbuka untuk diperiksa oleh mana-mana orang setelah dibayar fee yang ditetapkan.

(2) Ketua Pendaftar atau Pendaftar, mengikut mana yang berkenaan, hendaklah, setelah dibayar fee yang ditetapkan, memberi suatu salinan catatan dalam Daftar Perkahwinan dan indeks, yang diperakui dengan tandatangan dan meterai jawatan Ketua Pendaftar atau Pendaftar itu, mengikut mana yang berkenaan, kepada seseorang yang menghendakinya.

Seksyen 44
Bukti.

Tiap-tiap Daftar Perkahwinan yang disimpan oleh Ketua Pendaftar atau Pendaftar di bawah Akta ini dan sesuatu salinan apa-apa catatan di dalamnya, yang diperakui dengan tandatangan dan meterai jawatannya sebagai suatu salinan atau cabutan yang benar, adalah menjadi keterangan prima facie dalam semua mahkamah dan tribunal dalam mengenai tarikh-tarikh dan perbuatan-perbuatan yang terkandung atau dinyatakan dalam Daftar Perkahwinan, salinan atau cabutan itu.

BAHAGIAN V (PEMBUBARAN PERKAHWINAN)

Seksyen 45
Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.

Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata, tiada apa-apa jua dalam Akta ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali:-

- (a) jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini; atau
- (b) jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syara'; dan
- (c) jika pemastautinan salah satu pihak kepada perkahwinan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Wilayah Persekutuan.

Seksyen 46
Pertukaran agama

- (1) Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan itu murtad atau memeluk sesuatu kepercayaan lain daripada Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuatkuasa membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah.
- (2) Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam memeluk agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuatkuasa membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah.

Seksyen 47
Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.

- (1) Seseorang suami atau seseorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akuan mengandungi-
 - (a) butir-butir mengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina anak-anak, jika ada, hasil dari perkahwinan itu;
 - (b) butir-butir mengenai fakta-fakta yang memberi bidangkuasa kepada Mahkamah di bawah seksyen 45;

- (c) butir-butir mengenai apa-apa prosiding yang dahulu mengenai hal-hal suami isteri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat prosiding itu;
- (d) suatu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai;
- (e) suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa, dan, jika ada, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian;
- (f) syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa aset yang diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu, jika ada, atau, jika tiada, sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai, cadangan pemohon mengenai hal-hal itu; dan
- (g) butir-butir mengenai perintah yang diminta.
- (2) Selepas menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, Mahkamah hendaklah menyebabkan satu saman diserahkan kepada pihak yang satu lagi itu bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan Mahkamah untuk membolehkan Mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu.
- (3) Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu dan Mahkamah berpuas hati selepas penyiasatan yang wajar bahawa perkahwinan itu telah pecahbelah dengan tak dapat dipulihkan, maka Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah.
- (4) Mahkamah hendaklah merekodkan hal satu talaq itu, dan hendaklah menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- (5) Jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawai Agama sebagai pengurus dan dua orang lain, seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi isteri, dan merujukkan kes itu kepada jawatankuasa itu.
- (6) Pada melantik dua orang itu di bawah subseksyen (5), Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.
- (7) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada jawatankuasa pendamai itu tentang hal menjalankan perdamaian itu dan ia hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu.
- (8) Jika jawatankuasa itu tidak dapat bersetuju atau jika Mahkamah tidak berpuas hati tentang cara ia menjalankan perdamaian itu, Mahkamah

boleh memecat jawatankuasa itu dan melantik jawatankuasa lain bagi mengantikannya.

- (9) Jawatankuasa itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh yang lebih lama mengikut sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.
- (10) Jawatankuasa itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir dan hendaklah memberi tiap-tiap seorang dari mereka peluang untuk didengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain dan membuat apa-apa penyiasatan yang difikirkannya patut dan boleh, jika ia fikirkan perlu, menangguhkan prosidingnya dari semasa ke semasa.
- (11) Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, jawatankuasa itu hendaklah mengeluarkan suatu perakuan tentang hal yang demikian itu dan boleh melampirkan pada perakuan itu apa-apa syor yang difikirkannya patut berkenaan dengan nafkah dan penjagaan anak-anak belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, berkenaan dengan pembahagian harta, dan berkenaan dengan hal-hal lain berhubungan dengan perkahwinan itu.
- [Akta A902] (12) Tiada seseorang Peguam Syarie boleh hadir atau bertindak bagi mana-mana pihak dalam sesuatu prosiding di hadapan sesuatu jawatankuasa pendamai dan tiada sesuatu pihak boleh diwakili oleh sesiapa jua, selain dari seorang ahli keluarganya yang karib, tanpa kebenaran jawatankuasa pendamai itu.
- (13) Jika jawatankuasa itu melaporkan kepada Mahkamah bahawa perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup semula bersama sebagai suami isteri, Mahkamah hendaklah menolak permohonan untuk perceraian itu.
- (14) Jika jawatankuasa mengemukakan kepada Mahkamah suatu perakuan bahawa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, Mahkamah hendaklah menasihatkan suami yang berkenaan itu melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah, dan jika Mahkamah tidak dapat mendapatkan suami itu hadir di hadapan Mahkamah untuk melafazkan satu talaq, atau jika suami itu enggan melafazkan satu talaq, maka Mahkamah hendaklah merujuk kes itu kepada Hakam untuk tindakan menurut seksyen 48.
- (15) Kehendak subseksyen (5) tentang rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai tidak terpakai dalam sesuatu kes:-
 - (a) di mana pemohon mengatakan bahawa dia telah ditinggal langsung oleh pihak yang satu lagi itu dan tidak tahu di mana pihak yang satu lagi itu berada;
 - (b) di mana pihak yang satu lagi itu bermastautin di luar Malaysia Barat dan ianya tidak mungkin masuk ke dalam bidangkuasa Mahkamah yang berkenaan itu dalam masa enam bulan selepas tarikh permohonan itu;

- (c) di mana pihak yang satu lagi itu sedang di penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;
- (d) di mana pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi itu sedang mengidap penyakit otak yang tak boleh sembah; atau
- (e) di mana Mahkamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang luarbiasa yang menyebabkan rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai tidak praktik.
- [Akta A902] (16) Sesuatu talaq raj'i yang dilafazkan oleh suami melainkan dibatalkan terlebih dahulu, sama ada secara nyata atau tafsiran, atau dengan perintah daripada Mahkamah, tidak boleh berkuatkuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehingga habisnya tempoh 'iddah.
- [Akta A902] (17) Jika isteri hamil pada masa talaq itu dilafazkan atau pada masa perintah itu dibuat, talaq atau perintah itu tidak boleh berkuatkuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehingga berakhir kehamilan itu.

Seksyen 48
Timbangtara oleh Hakam.

- (1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkelahian (shiqaq) sentiasa berlaku antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, Mahkamah boleh melantik, mengikut Hukum Syara', dua orang penimbangtara atau Hakam untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri yang berkenaan itu masing-masing.
- (2) Pada melantik Hakam di bawah subseksyen (1) Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak yang berkenaan itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.
- (3) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada Hakam tentang hal menjalankan penimbangtaraan dan mereka hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu dan Hukum Syara'.
- (4) Jika Hakam tidak dapat bersetuju, atau jika Mahkamah tidak puas hati dengan cara mereka menjalankan penimbangtaraan itu, Mahkamah boleh memecat mereka dan melantik Hakam lain bagi menggantikan mereka.
- (5) Hakam hendaklah berusaha untuk mendapatkan kuasa penuh daripada prinsipal mereka masing-masing dan boleh, jika kuasa mereka membenarkan, melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah jika dibenarkan sedemikian oleh Mahkamah, dan jika demikian halnya, Mahkamah hendaklah merekodkan lafadz satu talaq itu, dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- (6) Jika Hakam berpendapat bahawa pihak-pihak itu patut bercerai tetapi tidak dapat memerintahkan penceraian oleh kerana sesuatu sebab, Mahkamah hendaklah melantik Hakam lain dan hendaklah memberi kepada mereka kuasa untuk memerintahkan perceraian dan hendaklah, jika mereka berbuat demikian, merekodkan perintah itu dan menghantarkan satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- (7) Melainkan jika dia adalah anggota keluarga terdekat pihak itu, maka tiada seorang pun atau Peguam Syarie boleh dibenarkan hadir atau mewakili mana-mana pihak di hadapan Hakam.

Seksyen 49
Perceraian khul' atau cerai tebus talaq.

- (1) Jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talaq dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-pihak itu bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talaq, Mahkamah hendaklah, selepas jumlah bayaran tebus talaq dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan, dan perceraian itu adalah ba-in-sughra atau tak boleh diruju'kan.
- (2) Mahkamah hendaklah merekodkan cerai tebus talaq itu dengan sewajarnya dan menghantarkan satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- (3) Jika jumlah bayaran tebus talaq tidak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, Mahkamah boleh mentaksirkan jumlah itu mengikut Hukum Syara' dengan memberi pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan pihak-pihak itu.
- (4) Jika suami tidak bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau tidak hadir di hadapan Mahkamah sebagaimana diarahkan, atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian, Mahkamah hendaklah melantik suatu jawatankuasa pendamai sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 47 dan seksyen itu hendaklah dipakai sewajarnya.

Seksyen 50
Perceraian di bawah ta'liq atau janji.

- (1) Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan ta'liq yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku.
- (2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu penyiasatan mengenai sahnya perceraian itu dan, jika berpuas hati bahawa perceraian itu adalah sah mengikut Hukum Syara', hendaklah mengesahkan dan merekodkan perceraian itu dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

Seksyen 50A
Perceraian dengan li'an

- [Akta A902]
- (1) Jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan telah mengangkat sumpah dengan cara li'an mengikut Hukum Syara' di hadapan Hakim Syarie, apabila penghakiman, maka Hakim Syarie itu hendaklah memerintahkan mereka difarakkan dan dipisahkan dan hidup berasingan selama-lamanya.
 - (2) Mahkamah hendaklah merekodkan perceraian dengan li'an itu dengan sewajarnya dan menghantar suatu salinan rekod itu kepada Pendaftar yang sesuai dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.

Seksyen 51
Hidup semula sebagai suami isteri ruju'

Seksyen 52

Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh

- (1) Seseorang perempuan yang berkahwin mengikut Hukum Syara' adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu-
- (a) bahawa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
 - (b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
 - (c) bahawa suami telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;
 - (d) bahawa suami telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
 - (e) bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk;
 - (f) bahawa suami telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;
 - (g) bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum ia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuh oleh suaminya itu;
 - (h) bahawa suami menganiayainya, iaitu, antara lain:-
 - (i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaja; atau
 - (ii) berkawan dengan perempuan-perempuan jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syara'; atau
 - (iii) cuba memaksa isteri hidup secara lucuah; atau
 - (iv) Melupuskan harta isteri atau melarang isteri itu dari menggunakan hak-haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu; atau
 - (v) Menghalang isteri dari menunai atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya; atau
 - (vi) jika ia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak Hukum Syara';
 - (i) bahawa walau pun empat bulan berlalu tetapi isteri masih belum disetubuh oleh kerana suami bersengaja enggan mensetubuhinya;
 - (j) bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau lain-lain hal keadaan yang diakui oleh Hukum Syara';
 - (k) bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguhpun berkebolehan memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit otak, sama ada berterusan atau berselangan dalam erti Ordinan Sakit Otak 1952 bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, atau Ordinan Lunatik bagi Wilayah Persekutuan Labuan, dan sakit otaknya adalah dari suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin;

[Akta A828]

(l) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syara'.

[Akta A902] (1A) Mana-mana orang yang berkahwin mengikut Hukum Syara' adalah berhak mendapatkan perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh atas alasan bahawa isteri menjadi tak upaya yang menghalang persetubuhan.

- (2) Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan (c) dalam subseksyen (1) sehingga hukuman itu telah dikemukakan dan suami telahpun menjalani satu tahun dari hukuman itu.
- (3) Sebelum membuat suatu perintah atas alasan dalam perenggan (e)dalam subseksyen (1) Mahkamah hendaklah, atas permohonan suami, membuat suatu perintah menghendaki suami memuaskan hati Mahkamah dalam tempoh enam bulan dari tarikh perintah itu bahawa dia tidak lagi mati pucuk, dan jika suami memuaskan hati Mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan itu.
- (4) Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas mana-mana alasan dalam subseksyen (1) jika suami memuaskan hati Mahkamah bahawa isteri, dengan mengetahui bahawa adalah terbuka kepadanya untuk mendapatkan perkahwinan itu ditolak, telah bertingkahlaku terhadap suaminya dengan cara yang menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah bahawa isteri tidak akan menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah tidak adil kepada suami jika dibuat perintah itu.

Seksyen 53

Anggapan mati.

[Akta A902] (1) Jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi suatu tempoh empat tahun atau lebih, dan hal keadaan adalah sebegini hingga dia patut, bagi maksud membolehkan perempuan itu berkahwin semula, dianggap mengikut Hukum Syara' sebagai telah mati, maka Mahkamah boleh, di atas permohonan perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar, mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan suatu perakuan menganggap kematian suami itu dan Mahkamah boleh di atas permohonan perempuan itu membuat perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 52.

- (2) Suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah disifatkan sebagai perakuan kematian suami itu dalam erti seksyen 14 (4) (b).3)Dalam hal keadaan yang disebut dalam subseksyen (1), seseorang perempuan adalah tidak berhak berkahwin semula tanpa suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) walaupun Mahkamah Tinggi mungkin telah memberi kebenaran menganggap suami itu telah mati.4)Perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah didaftarkan seolah-olah perakuan itu telah mewujudkan perceraian.

Seksyen 54

Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.

- (1) Tiap-tiap Pendaftar dan juga Ketua Pendaftar hendaklah masing-masing menyenggara suatu Daftar Perceraian dan Pembatalan dan hendaklah serta-merta mencatatkan di dalamnya butir-butir yang ditetapkan mengenai semua perintah perceraian dan pembatalan yang dihantar kepadanya di bawah subseksyen (2) dan mengenai semua perintah perceraian dan pembatalan yang dipohon di bawah subseksyen (3) untuk didaftarkan.
- (2) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi dan merekodkan sesuatu perintah perceraian atau pembatalan atau yang benar dan merekodkan sesuatu talaq atau apa-apa lain bentuk perceraian hendaklah serta-merta menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- (3) Jika sesuatu perkahwinan yang diakadnikahkan dalam Wilayah Persekutuan adalah dibubarkan atau dibatalkan dengan suatu perintah Mahkamah yang layak berbidangkuasa di luar Wilayah Persekutuan, salah satu daripada pihak-pihak itu boleh memohon kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan perintah itu, dan Pendaftar yang berkenaan itu dan Ketua Pendaftar hendaklah mendaftarkan perintah itu apabila berpuas hati bahawa perintah itu adalah satu perintah yang patut diiktiraf sebagai sah bagi maksud-maksud undang-undang dalam Wilayah Persekutuan.
- (4) Jika sesuatu lafaz talaq di hadapan Mahkamah atau sesuatu perintah perceraian atau pembatalan, di mana jua telah diberi, telah membubarkan sesuatu perkahwinan yang telah diakadnikahkan dalam Wilayah Persekutuan dan telah didaftarkan di bawah Akta ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa sebelum Akta ini, Pendaftar yang berkenaan dan Ketua Pendaftar hendaklah, apabila mendaftarkan talaq atau perintah itu, mengarahkan supaya catatan mengenai perkahwinan itu dalam Daftar Perkahwinan ditandakan dengan perkataan "Dibubarkan" dan dengan rujukan mengenai perbicaraan dalam mana talaq itu telah dilafazkan atau perintah itu telah dibuat.
- (5) Apabila mendaftarkan sesuatu talaq atau perintah perceraian atau pembatalan itu dan apabila dibayar kepadanya fee yang ditetapkan, Ketua Pendaftar hendaklah mengeluarkan surat perakuan cerai dan pembatalan dalam borang yang ditetapkan kepada kedua-dua pihak itu.

Seksyen 55

Pendaftaran perceraian

[Akta A902] Tiada lafaz talaq atau perintah perceraian atau pembatalan boleh didaftarkan melainkan Ketua Pendaftar berpuas hati bahawa Mahkamah telah membuat perintah muktamad berhubungan dengannya.

Seksyen 55A

Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah.

- [Akta A902] (1) Walau apa pun seksyen 54, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.
- (2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafaz itu adalah sah mengikut Hukum Syara'.

- (3) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa talaq yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syara', maka Mahkamah hendaklah, tertakluk kepada seksyen 124-
- (a) membuat perintah membenarkan perceraian dengan talaq;
 - (b) merekodkan perceraian itu; dan
 - (c) menghantar salinan rekod itu kepada Pendaftar yang sewajarnya dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.

Seksyen 56

Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut

Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syara'.

Seksyen 57

Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini boleh menyentuh apa-apa hak yang mungkin ada pada seseorang isteri di bawah Hukum Syara' terhadap mas kahwinnya dan pemberian kepadanya atau apa-apa bahagian daripadanya apabila perkahwinannya dibubarkan.

Seksyen 58

Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

- (1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.
- (2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang
 - (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
 - (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
 - (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.
- (3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

- (4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-
- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga;
 - (b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.
- (5) Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka

BAHAGIAN VI (NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN)

Seksyen 59

Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.

- (1) Tertakluk kepada Hukum Syara', Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
- (2) Tertakluk kepada Hukum Syara' dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu, antara lain-
 - (a) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
 - (b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya;
 - (c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syara'.
- (3) Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz.

Seksyen 60

Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi seseorang tertentu

Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungan tentang hal itu mengikut Hukum Syara', supaya membayar nafkah kepada seorang lain jika dia tak upaya, sepenuhnya atau sebahagiannya, dari mencari kehidupan oleh sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat dan Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuan orang yang pertama tersebut itu adalah munasabah memerintahkan sedemikian.

Seksyen 61 Pentaksiran nafkah.

Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.

Seksyen 62

Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.

Mahkamah boleh, apabila menentukan nafkah, memerintahkan orang yang bertanggungan membayar nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau apa-apa bahagiannya dengan meletakkan apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.

Seksyen 63

Mengkompaun nafkah.

Sesuatu perjanjian untuk membayar, dengan wang atau lain-lain harta, wang pokok bagi menjelaskan segala tuntutan nafkah masa hadapan tidak boleh berkuatkuasa sehingga ia telah diluluskan, dengan atau tanpa syarat-syarat, oleh Mahkamah, tetapi apabila diluluskan sedemikian, hendaklah menjadi suatu pembelaan yang memadai terhadap apa-apa tuntutan nafkah.

Seksyen 64

Lamanya tempoh perintah nafkah.

Kecuali jika sesuatu perintah nafkah dinyatakan sebagai selama sesuatu tempoh yang lebih singkat atau telah dibatalkan, dan tertakluk kepada seksyen 65, sesuatu perintah nafkah hendaklah tamat apabila mati orang yang kena membayar nafkah itu atau apabila mati orang yang berhak menerima nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, mengikut mana yang lebih awal.

Seksyen 65

Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.

- (1) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh 'iddah atau apabila isteri itu menjadi nusyuz.
- [Akta A902] (2) Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada bekas suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkahwinan semula isteri itu.

Seksyen 66

Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah nafkah yang masih berkuatkuasa, sama ada bercagar atau tak bercagar, atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas hati, bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

Seksyen 67
Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.

Tertakluk kepada seksyen 63, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian tentang nafkah yang dibuat antara suami dan isteri, sama ada dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, jika Mahkamah berpuas hati bahawa sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu.

Seksyen 68
Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak miliknya.

Nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di bawah sesuatu perintah Mahkamah tidak boleh diserahkan atau dipindahmilik atau kena ditahan, diasingkan, atau dikenakan levi untuk, atau berkenaan dengan, apa-apa hutang atau tuntutan.

Seksyen 69
Menuntut tunggakan nafkah.

- [Akta A902] (1) Tunggakan nafkah yang tak bercagar, boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pesakanya.
- (2) Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

Seksyen 70
Nafkah sementara.

- (1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa terdapat alasan-alasan untuk membayar nafkah, Mahkamah boleh membuat suatu perintah terhadap suami bagi membayar nafkah sementara yang akan berkuatkuasa dengan serta-merta dan terus berkuatkuasa sehingga perintah Mahkamah dibuat atas permohonan untuk nafkah.
- (2) Suami boleh melaraskan nafkah sementara yang dibayar dengan amaun yang diperintah supaya dibayar untuk nafkah di bawah perintah Mahkamah, dengan syarat bahawa amaun yang diterima oleh isteri, setelah ditolak apa-apa potongan, adalah cukup untuk keperluan asasnya.

Seksyen 71
Hak tempat tinggal.

- (3) Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri.
- (4) Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam subseksyen (1) akan terhenti-

- (a) jika tempoh 'iddah telah tamat; atau
(b) jika tempoh penjagaan anak telah tamat; atau
 jika perempuan itu telah berkahwin semula; atau
[Akta A902] (d) jika perempuan itu telah bersalah melakukan perbuatan yang memberihikan secara terbuka (fahisyah), dan sesudah itu suami boleh memohon kepada Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya.

Seksyen 72

Kewajipan menanggung nafkah anak.

- (1) Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan, dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.
- (2) Kecuali seperti tersebut di atas, adalah menjadi kewajipan seseorang yang bertanggungan di bawah Hukum Syara', supaya menanggung nafkah atau memberi sumbangan kepada nafkah kanak-kanak jika bapa kanak-kanak itu telah mati atau tempat di mana bapanya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana bapanya tidak berupaya menanggung nafkah mereka.

Seksyen 73

Kuasa mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.

Seksyen 74

Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.

- (1) Mahkamah boleh, apabila memerintahkan pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak, memerintahkan orang yang bertanggungan membayar nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau sebahagian daripadanya dengan meletakhak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.
- (2) Kemungkinan mematuhi perintah menghendaki orang yang bertanggungan membayar nafkah itu meletakhak apa-apa harta pada pemegang amanah bagi maksud subseksyen (1) boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

Seksyen 75

Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.

Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

Seksyen 76

Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian berhubung dengan penjagaan atau nafkah seseorang anak, sama ada perjanjian itu dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu, jika Mahkamah berpuas hati bahawa adalah munasabah dan untuk kebijakan anak itu berbuat demikian.

Seksyen 77

Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.

- [Akta A902] Seksyen 69 hendaklah dipakai, dengan pindaan yang sesuai, dan mengikut Hukum Syara' bagi perintah-perintah mengenai pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak.

Seksyen 78

Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.

- (3) Jika seseorang lelaki telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan anaknya sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak, setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian, dan Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi memastikan kebijakan kanak-kanak itu.
- [Akta A902] (2) Kewajipan yang ditanggung oleh subseksyen (1) hendaklah terhenti jika kanak-kanak itu dibawa balik oleh bapa atau ibunya.

- [Akta A902] (3) Apa-apa wang yang dibelanjakan oleh seseorang lelaki pada menanggung nafkah seseorang kanak-kanak sebagaimana dikehendaki oleh subseksyen (1) boleh dituntut daripada bapa atau ibu kanak-kanak itu.

Seksyen 79

Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.

Kecuali :-

- (a) jika sesuatu perintah mengenai nafkah seseorang anak dinyata sebagai selama tempoh yang lebih singkat; atau
- (b) jika sesuatu perintah itu telah dibatalkan; atau
- (c) jika sesuatu perintah itu dibuat untuk-
 - (i) seseorang anak perempuan yang belum berkahwin atau yang, oleh sebab sesuatu hilangupaya dari segi otak atau jasmani, tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya;
 - (ii) seorang anak lelaki yang, oleh sebab sesuatu hilangupaya dari segi otak atau jasmani, tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya, perintah nafkah hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya munasabah, bagi membolehkan anak itu mengikuti pelajaran atau latihan lanjut atau lebih tinggi.

Seksyen 80
Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf.

- (1) Jika seseorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah seseorang anaknya yang tak sahtaraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang anak yang dilahirkan akibat rogol, Mahkamah boleh, apabila hal itu dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu memberi apa-apa elau bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah.
- [Akta A902] (2) [Dipotong].

- (3) Elau bulanan di bawah seksyen ini hendaklah kena dibayar dari tarikh bermulanya kecuaian atau keengganan menanggung nafkah itu atau dari sesuatu tarikh yang kemudian mengikut sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu.

BAHAGIAN VII (PENJAGAAN)
Hadanah atau Penjagaan Kanak-kanak

Seksyen 81
Orang-orang yang berhak menjaga kanak-kanak.

- (1) Tertakluk kepada seksyen 82, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.
- (2) Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakan di bawah Hukum Syara' dari mempunyai hak terhadap hadanah atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu :-
- (a) nenek sebelah ibu hingga ke atas peringkatnya
 - (b) bapa;
 - (c) nenek sebelah bapa hingga ke atas peringkatnya;
 - (d) kakak atau adik perempuan seibu seapa;
 - (e) kakak atau adik perempuan seibu;
 - (f) kakak atau adik perempuan seapa;
 - (g) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu seapa;
 - (h) anak perempuan dari kakak atau adik seibu;
 - (i) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seapa;
 - (j) emak saudara sebelah ibu;
 - (k) emak saudara sebelah bapa;
- (l) waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai 'asabah atau residuari: Dengan syarat penjagaan orang demikian tidak menjelaskan kebijakan kanak-kanak itu.
- (3) Tiada seseorang lelaki berhak terhadap penjagaan seseorang kanak-kanak perempuan melainkan lelaki itu adalah seorang muhrim, iaitu, dia mempunyai pertalian dengan kanak-kanak perempuan itu dalam mana dia dilarang berkahwin dengannya.
- [Akta A902] (4) Tertakluk kepada seksyen 82 dan 84, jika ada beberapa orang dari keturunan atau peringkat yang sama, kesemuanya sama berkelayakan dan bersetuju

menjaga kanak-kanak itu, penjagaan hendaklah diamanahkan kepada orang yang mempunyai sifat-sifat paling mulia yang menunjukkan perasaan paling kasih sayang kepada kanak-kanak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai sifat-sifat kemuliaan, maka yang tertua antara mereka adalah berhak mendapat keutamaan.

Seksyen 82

Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.

[Akta A902] Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadanah jika-

- (a) dia adalah seorang Islam;
- (b) dia adalah sempurna akal;
- (c) dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;
- (d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan
- (e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.

Seksyen 83

Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang :-

[Akta A902] (a) jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjelaskan kebijakan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan;

(b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;

(c) jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;

(d) jika perempuan itu murtad;

(e) jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

Seksyen 84

Lamanya penjagaan.

- (1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.
- (2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

Seksyen 85
Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

Seksyen 86
Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.

- (1) Walau apa pun peruntukan seksyen 81, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuannya adalah termasuk kebijakan kanak-kanak.
- (2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebijikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada :-
 - (a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan
 - (b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.
- (3) Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta sesuatu kes tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan.
- (4) Jika ada dua orang atau lebih kanak-kanak dari sesuatu perkahwinan, Mahkamah tidaklah terikat meletakkan kedua-dua atau kesemuanya dalam jagaan orang yang sama tetapi hendaklah menimbangkan kebijikan tiap-tiap seorang secara berasingan.
- [Akta A902] (5) Mahkamah boleh, jika perlu, membuat perintah interim untuk menempatkan kanak-kanak itu dalam penjagaan mana-mana orang atau institusi atau persatuan dan perintah itu hendaklah serta merta dikuatkuasakan dan terus dikuatkuasakan sehingga Mahkamah membuat perintah bagi penjagaan itu.

Seksyen 87
Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

- (1) Sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan dan, tertakluk kepada syarat-syarat, jika ada, yang dipakai dari semasa ke semasa, perintah itu adalah menghakkan orang yang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua soal berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran kanak-kanak itu.
- (2) Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh-
 - (a) mengandungi syarat-syarat tentang tempat di mana kanak-kanak itu akan tinggal dan cara pelajarannya;

- (b) mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada bagi sementara dalam pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberi jagaan itu;
- (c) mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah;
- (d) memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah; atau
- (e) milarang orang yang diberi jagaan itu daripada membawa kanak-kanak itu keluar dari Malaysia.

Penjagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 88

Orang-orang yang berhak kepada penjagaan.

- (1) Sungguh pun hak terhadap hadanah atau penjagaan anak mungkin terletak pada seseorang lain, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu-
 - (a) datuk lelaki di sebelah bapa;
 - (b) wasi yang dilantik menurut wasiat bapa;
 - (c) wasi kepada wasi bapa;
 - (d) wasi datuk lelaki di sebelah bapa;
 - (e) wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa,
 dengan syarat bahawa dia adalah seorang Islam, seorang dewasa, adalah siuman, dan boleh dipercayai.
- (2) Bapa adalah sentiasa mempunyai kuasa paling luas untuk membuat melalui wasiat apa-apa perkiraan yang difikirkannya baik sekali berhubung dengan penjagaan anak-anaknya yang masih kanak-kanak dan berhubung dengan hal memperlindungi kepentingan-kepentingan mereka, dengan syarat bahawa dia adalah siuman sepenuhnya.
- (3) Subseksyen (1) tidaklah terpakai jika had-had dan syarat-syarat bagi suratcara yang meletakkan harta pada kanak-kanak itu terang-terang tidak membenarkan orang-orang yang tersebut di dalamnya daripada menjalankan apa-apa kuasa ke atas harta itu, dan dalam hal yang demikian Mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.4) Bagi maksud-maksud penjagaan ke atas diri dan harta, seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak melainkan dia telah genap umur lapan belas tahun.

Seksyen 89

Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih.

- (1) Berkenaan dengan harta takalih, seseorang penjaga di sisi undang-undang tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menjual, kecuali dalam hal-hal yang berikut, iaitu-

- (iii) jika, dengan menjual harta itu kepada orang luar, dia boleh mendapat harga sekurang-kurangnya dua kali ganda harga harta itu;
 - (iv) jika kanak-kanak itu tidak mempunyai apa-apa mata pencarian lain, dan penjualan itu adalah benar-benar perlu untuk menanggung nafkahnya, dan kanak-kanak itu tidak mempunyai apa-apa harta lain;
 - (v) jika harta itu perlu dijual bagi maksud menjelaskan hutang pewasiat, yang tidak dapat diselesaikan jika harta itu tidak dijual;
 - (vi) jika ada sesuatu peruntukan am dalam wasiat pewasiat itu yang tidak dapat dikuatkuasakan dengan tidak dijual harta itu;
 - (vii) jika pendapatan yang terkumpul dari harta pesaka itu tidak mencukupi untuk membayar perbelanjaan yang telah dilakukan dalam menguruskannya dan untuk membayar hasil tanah;
 - (viii) jika harta itu sedang diancam bahaya yang akan menyebabkannya menjadi musnah atau binasa oleh kerana reput;
 - (ix) jika harta itu ada dalam tangan orang yang tidak berhak kepadanya, dan penjaga itu ada sebab bagi mengkhawatir bahawa tidak ada peluang bagi mendapatkan pemulihian yang saksama; atau
 - (x) dalam sesuatu hal lain, jika harta itu benar-benar perlu dijual atas alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh Hukum Syara' dan penjualan itu adalah nyata atau jelas sekali untuk faedah kanak-kanak itu.
- (2) Berkenaan dengan harta alih, seseorang penjaga di sisi undang-undang adalah mempunyai kuasa menjual atau menyandarkan barang-barang dan hartabenda kanak-kanak itu, jika dia berkehendakkan keperluan-keperluan yang mustahak, seperti makanan, pakaian dan asuhan; dan jika harta alih seseorang kanak-kanak adalah dijual dengan ikhlas dan jujur bagi sesuatu balasan yang memadai dengan tujuan melaburkan hasil jualan itu dengan selamat dan untuk memperolehi pendapatan tambahan, maka penjualan harta itu hendaklah dikira sebagai sah.

Seksyen 90

Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.

- (1) Jika tidak ada penjaga-penjaga di sisi undang-undang, maka kewajipan bagi melantik seseorang penjaga untuk memperlindungi dan memelihara harta kanak-kanak itu adalah terletak ke atas Mahkamah dan pada membuat sesuatu perlantikan Mahkamah hendaklah terutama sekali memberi pertimbangan-pertimbangan kepada kebijakan kanak-kanak itu.
- (2) Pada menimbangkan apakah akan menjadi kebijakan bagi kanak-kanak itu, Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang umur dan jantina kanak-kanak itu, watak dan kebolehan penjaga yang dicadangkan itu dan bagaimana karibnya persaudaraannya dengan kanak-kanak itu; kemahuan-kemahuan, jika ada, ibu bapanya yang telah mati, dan apa-apa hubungan penjaga yang dicadangkan itu yang sedia ada dan yang dahulu dengan kanak-kanak itu atau dengan hartanya, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur membolehkannya untuk membuat sesuatu pilihan yang bijak, maka Mahkamah boleh menimbangkan pilihannya itu.

Seksyen 91

Perlantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.

Seseorang ibu, sama ada seorang Islam atau seorang Kitabiyah, boleh dilantik dengan sah menjadi wasi bagi bapa, dan dalam hal yang demikian ibu itu boleh menjalankan kuasa-kuasanya sebagai penjaga melalui wasiat atau, jika tidak ada seorang penjaga di sisi undang-undang ia boleh dilantik sebagai penjaga di sisi undang-undang oleh Mahkamah, tetapi jika dia tidak dilantik sebagai demikian maka dia tidak boleh membuat apa-apa urusan mengenai harta kanak-kanak itu.

Seksyen 92
Penjaga bersama dengan ibu.

Jika Mahkamah melantik ibu menjadi penjaga, Mahkamah boleh juga melantik seorang lain menjadi penjaga sama ada bagi diri atau harta kanak-kanak itu atau kedua-duanya, untuk bertindak bersama dengan ibu itu.

Seksyen 93
Perubahan kuasa penjaga harta.

Pada melantik seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak, Mahkamah boleh, dengan perintah, menentukan, menyekat, atau memperluaskan kuasa penjaga berhubungan dengannya, setakat mana yang perlu bagi kebijakan kanak-kanak itu.

Seksyen 94
Pemecatan penjaga.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa memecat seseorang penjaga, sama ada seorang ibu bapa atau orang lain dan sama ada dia adalah penjaga bagi diri atau harta kanak-kanak, dan boleh melantik seorang lain menjadi penjaga untuk menggantikannya.

Seksyen 95
Cagaran hendaklah diberi.

- (1) Jika seseorang dilantik oleh Mahkamah menjadi penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak maka dia hendaklah, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, memberi cagaran dengan nilai sebanyak mana yang ditetapkan bahawa dia akan melaksanakan kewajipan-kewajipan sebagai penjaga dengan sewajarnya.
- (2) Cagaran itu hendaklah diberi mengikut cara yang ditetapkan pada masa itu bagi penerima-penerima yang dilantik oleh Mahkamah; dan penjaga yang dilantik itu hendaklah mengemukakan akaun-akuannya pada tempoh-tempoh yang diperintahkan dan hendaklah membayar apa-apa baki yang diperakui kena dibayar olehnya ke dalam Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan bagi penerima-penerima.

Seksyen 96
Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.

- (1) Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, tanpa kebenaran Mahkamah-
 - (a) menjual, menggadaikan, mengadai janji, menukar, ataupun dengan cara lain melepaskan milik mana-mana harta alih atau harta takalih kanak-kanak itu;
 - atau

- (b) memajakkan mana-mana tanah keupayaan kanak-kanak itu selama tempoh lebih daripada satu tahun.
- (2) Apa-apa pelupusan harta seseorang kanak-kanak yang dilakukan bersalah dengan seksyen ini boleh ditetapkan sebagai taksah, dan atas penetapan itu Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang pada pendapatnya perlu untuk mengembalikan harta yang dilupuskan itu kepada kanak-kanak itu.
- (3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah subseksyen (2) melainkan jika perlu atau baik bagi kepentingan kanak-kanak itu.

Seksyen 97

Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.

Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, melainkan jika Mahkamah memerintah sebaliknya dalam suatu hal, diberi kuasa untuk memberi akuan penyelesaian yang sewajarnya bagi apa-apa legasi atau apa-apa wang modal lain yang kena dibayar kepada atau boleh diterima oleh kanak-kanak itu.

Seksyen 98

Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan

- (1) Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak yang dilantik oleh Mahkamah boleh membuat peruntukan yang berpatutan dari pendapatan harta itu untuk menanggung nafkah dan pelajaran kanak-kanak itu memandang kepada taraf kehidupan kanak-kanak itu; tetapi tiada apa-apa jumlah wang lebih daripada tiga ratus ringgit sebulan boleh digunakan sedemikian tanpa kebenaran Mahkamah.
- (2) Jika pendapatan dari harta kanak-kanak itu yang ada dalam tangan penjaga itu tidak mencukupi bagi maksud itu, atau jika wang adalah dikehendaki untuk kemajuan kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh memerintahkan supaya peruntukan bagi maksud itu diadakan dari harta modal kanak-kanak itu dan, bagi maksud itu, Mahkamah boleh membentarkan apa-apa bahagian dari harta kanak-kanak itu dijual, digadaikan, atau digadai janji dan boleh memberi apa-apa arahan mengenainya sebagaimana yang perlu bagi kepentingan kanak-kanak itu.

Seksyen 99

Perintah khas mengenai harta kecil.

- (1) Jika memandang kepada taraf kehidupan kanak-kanak itu dan kepada nilai hartanya dan juga kepada segala hal keadaan kes yang berkenaan adalah didapati bermanfaat supaya harta modal kanak-kanak itu digunakan bagi menanggung nafkah, pelajaran, atau kemajuannya dengan cara yang boleh mengelakkan belanja bagi membuat permohonan kepada Mahkamah, maka Mahkamah, daripada melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu, boleh memerintahkan supaya segala harta kanak-kanak itu, dari apa jua jenis pun, diletakkan dalam tangan seseorang yang akan dilantik oleh Mahkamah, dengan kuasa yang penuh untuk membuat apa-apa urusan dan untuk menggunakan harta itu bagi maksud yang tersebut di atas menurut budi bicaranya sendiri bebas dari apa-apa kawalan; dan dalam hal yang demikian resit dari orang yang dilantik itu adalah menjadi akuan penyelesaian yang sewajarnya bagi sesiapa jua yang membuat apa-apa pembayaran atau pindahmilik apa-apa harta kepadanya bagi pihak kanak-kanak itu.

(2) Seseorang yang dilantik di bawah subseksyen (1) boleh diperintahkan oleh Mahkamah supaya mengemukakan suatu akaun mengenai urusan-urusan yang dibuat olehnya mengenai harta kanak-kanak itu. 3) Mahkamah boleh, kerana sesuatu sebab yang memadai, membatalkan apa-apa perintah, atau memansuhkan apa-apa perlantikan, yang dibuat di bawah subseksyen (1), dan boleh melantik seorang lain dengan memberi kepadanya kuasa yang sama atau apa-apa kuasa yang lebih besar atau lebih kecil yang difikirkannya patut, atau boleh melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.

Seksyen 100

Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.

Seseorang penjaga boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan pendapat, nasihat, atau budi bicaranya atas apa-apa soal mengenai pengurusan atau pentadbiran harta kanak-kanak itu.

Seksyen 101

Perintah larangan oleh Mahkamah

(1) Walau apa pun peruntukan-peruntukan seksyen 89, Mahkamah boleh, jika ia difikirkan perlu berbuat demikian membuat suatu perintah melarang bapa atau datuk lelaki di sebelah bapa seorang kanak-kanak atau wasi-wasi mereka masing-masing atau wasi-wasi kepada wasi-wasi mereka masing-masing dari-

- (a) menjual, menggadaikan, menggadai janji, menukar, ataupun dengan cara lain melepaskan milik mana-mana harta alih atau harta takalih kanak-kanak itu; atau
- (b) memajakkan mana-mana tanah kepunyaan kanak-kanak itu selama tempoh lebih daripada satu tahun,

tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu dari Mahkamah.

(2) Apa-apa pelupusan harta seseorang kanak-kanak bersalah dengan perintah itu boleh ditetapkan sebagai taksah, dan atas penetapan itu Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang difikirkannya perlu untuk mengembalikan harta yang dilupuskan itu kepada kanak-kanak itu.

(3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah subseksyen (2) melainkan jika perlu atau baik bagi kepentingan kanak-kanak itu.

Seksyen 102

Penjaga bagi anak yatim.

Jika bapa dan datuk lelaki seseorang kanak-kanak telah mati tanpa melantik seorang penjaga melalui wasiat, mana-mana penghulu, pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada Sarjan, mana-mana orang yang menjaga kanak-kanak itu, atau mana-mana orang yang ada mempunyai kuasa-kuasa seorang Pelindung di bawah Akta Kanak-Kanak dan Orang-Orang Muda 1947, boleh menyebabkan kanak-kanak itu dibawa ke hadapan Mahkamah dan Mahkamah boleh melantik seorang penjaga sama ada bagi diri atau bagi harta kanak-kanak itu, atau kedua-duanya.

Seksyen 103

[Akta A902]

(Dipotong).

Seksyen 104

Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.

Apabila menimbangkan apa-apa soal berhubungan dengan penjagaan atau nafkah seseorang kanak-kanak, Mahkamah hendaklah, bila-bila juga praktik, menerima nasihat seseorang, sama ada pegawai awam atau tidak, yang terlatih atau berpengalaman dalam kebajikan kanak-kanak tetapi Mahkamah tidaklah terikat untuk menuruti nasihat itu.

Seksyen 105

Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

- (1) Mahkamah boleh, atas permohonan bapa atau ibu seseorang anak-
 - (a) jika keputusan sesuatu perbicaraan hal-ehwal suami-isteri belum selesai; atau
 - (b) jika, di bawah sesuatu perjanjian atau di bawah perintah Mahkamah, hanya ibu sahaja atau bapa sahaja ada mempunyai jagaan atas anak itu manakala yang satu lagi itu tidak ada mempunyai jagaan,
- mengeluarkan suatu tegahan menahan pihak yang satu lagi itu daripada membawa anak itu keluar dari Malaysia atau Mahkamah boleh memberikan anak itu dibawa keluar dari Malaysia sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada apa-apa syarat atau akujanji yang difikirkan patut oleh Mahkamah.
- (2) Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, mengeluarkan suatu tegahan menahan seseorang, lain daripada orang yang ada mempunyai jagaan atas kanak-kanak itu, daripada membawa seseorang kanak-kanak keluar dari Malaysia.
- (3) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

Relif-relif Lain

Seksyen 106

Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksud untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah

- (1) Jika :-
 - (a) sesuatu perbicaraan hal-ehwal suami-isteri belum selesai; atau
 - (b) sesuatu perintah telah dibuat di bawah seksyen 56, 59, atau 73 dan belum lagi dibatalkan; atau
 - (c) nafkah kena dibayar di bawah sesuatu perjanjian kepada atau untuk faedah seorang isteri atau isteri yang dahulu atau anak,

Mahkamah adalah berkuasa atas permohonan :-

- (i) jika ia berpuas hati bahawa apa-apa perpindahan harta telah dilakukan oleh suami atau suami yang dahulu atau ibu atau bapa bagi orang yang telah membuat atau yang bagi pihaknya telah dibuat permohonan itu, dalam masa tiga tahun sebelumnya, dengan tujuan di pihak orang yang melakukan perpindahan itu hendak mengurangkan kemampuannya membayar nafkah atau kemampuan suami itu membayar mut'ah atau hendak menghalangi isterinya daripada apa-apa hak berhubungan dengan harta itu, tertakluk

kepada subseksyen (2), menghendaki orang yang membuat perpindahan itu membatalkan perpindahan itu; dan

(ii) jika ia berpuas hati bahawa sesuatu perpindahan harta dicadang hendak dilakukan dengan sesuatu tujuan yang demikian, memberi suatu tegahan menahan perpindahan itu.

(2) Bagi maksud-maksud seksyen ini :-

"**harta**" ertinya apa-apa jenis harta, alih atau takalih, dan termasuklah wang;

"**perpindahan**" termasuklah sesuatu penjualan, pemberian, pajakan, gadai janji, atau apa-apa transaksi lain yang dengannya pemunyaan atau pemilikan harta itu adalah dipindahmilik atau dibebankan tetapi tidak termasuk sesuatu perpindahan yang dilakukan kerana wang atau sesuatu bernilai wang kepada atau untuk faedah seseorang yang bertindak dengan suci hati dan dengan tidak mengetahui tujuan perpindahan itu dilakukan.

(3) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

Seksyen 107

Tegahan terhadap gangguan

(1) Mahkamah adalah berkuasa dalam masa perbicaraan hal-ehwal suami-isteri masih belum selesai atau pada atau selepas pemberian sesuatu perintah perceraian, fasakh, atau pembatalan, memerintahkan seseorang menahan dirinya dari mengganggu atau menceroboh; dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isterinya.

(2) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

BAHAGIAN VIII (PELBAGAI)

Seksyen 108

Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Wilayah Persekutuan.

(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Wilayah Persekutuan, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Akta ini jika-

- (a) perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang tempat di mana ia telah dilakukan;
- (b) tiap-tiap satu pihak itu ada mempunyai, pada masa perkahwinannya itu, keupayaan berkahwin di bawah undang-undang tempat bermastautinnya; dan
- (c) jika salah satu pihak itu adalah seorang pemastautin di Wilayah Persekutuan, kedua-dua pihak ada mempunyai keupayaan berkahwin mengikut Akta ini.

[Akta A902] (2) [Dipotong].

Seksyen 109

Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan, dsb., di Wilayah Persekutuan.

(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul

negara asing di Wilayah Persekutuan hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Akta ini jika :-

- (a) perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang negara Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul itu, atau mengikut cara yang dibenarkan di bawah Akta ini;
- (b) tiap-tiap satu pihak itu ada mempunyai, pada masa perkahwinannya itu, keupayaan berkahwin di bawah undang-undang tempat bermastautinnya; dan
- (c) jika salah satu pihak itu adalah seorang pemastautin di Wilayah Persekutuan, kedua-dua pihak ada mempunyai keupayaan berkahwin mengikut Akta ini.

[Akta A902] (2) [Dipotong].

Kesahteraan Anak

Seksyen 110

Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa

Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa empat tahun qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh, dengan cara li'an atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.

Seksyen 111

Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan

Jika anak itu dilahirkan lebih daripada empat tahun qamariah selepas perkahwinan itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, lelaki itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa anak itu melainkan jika lelaki itu atau mana-mana warisnya menegaskan bahawa anak itu adalah anak lelaki itu.

Seksyen 112

Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat.

Jika seorang perempuan, yang tidak berkahwin semula, membuat satu pengakuan bahawa tempoh 'iddahnya telah tamat sama ada 'iddah itu adalah oleh sebab kematian atau perceraian dan perempuan itu kemudiannya melahirkan seorang anak, maka suami perempuan itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa anak itu melainkan jika anak itu telah dilahirkan kurang daripada empat tahun qamariah dari tarikh perkahwinan itu dibubarkan oleh sebab kematian suaminya itu atau oleh sebab perceraian.

Seksyen 113

Persetubuhan syubhah.

Jika seorang lelaki melakukan persetubuhan syubhah dengan seorang perempuan dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan

qamariah hingga empat tahun qamariah selepas persetubuhan itu, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu.

Seksyen 114
Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.

Jika seseorang lelaki mengaku seorang lain, sama ada dengan nyata atau dengan tersirat, sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu jika syarat-syarat yang berikut dipenuhi, iaitu :-

- (a) tiada seseorang lain disifatkan sebagai bapa anak itu;
- (b) perbezaan antara umur lelaki itu dengan umur anak itu memunasabahkan pertalian antara mereka sebagai bapa dan anak;
- (c) jika anak itu telah akil baligh, di mana dia boleh membuat keputusan, anak itu telah mempersetujui tentang ianya diakui sebagai anak;
- (d) lelaki dan ibu anak itu mungkin boleh disatukan dengan sah dalam perkahwinan pada masa pemberian;
- (e) pengakuan itu bukannya cuma mengakui anak itu sebagai anaknya, bahkan mengakui anak itu sebagai anak sahtarafnya;
- (f) lelaki itu adalah berkeupayaan membuat kontrak;
- (g) pengakuan itu dibuat dengan tujuan semata-mata untuk memberi taraf kesahtaranan;
- (h) pengakuan itu adalah jelas maksudnya dan anak itu adalah diakui sebagai anak kandungnya.

Seksyen 115
Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.

Anggapan yang berbangkit dari pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa dia adalah bapa kepada seseorang yang diakuinya sebagai anak boleh dipatahkan hanya dengan-

- (a) penolakan di pihak orang yang telah diakui sebagai anak itu;
- (b) bukti bahawa perbezaan umur antara pihak yang mengaku dan pihak yang diakui adalah sebegini kecil, atau bahawa umur pihak yang diakui adalah sebegini tinggi, hingga menyebabkan pertalian yang dikatakan itu mustahil dari segi fizikal;
- (c) bukti bahawa pihak yang diakui itu adalah sebenarnya anak seorang lain; atau
- (d) bukti bahawa ibu anak itu tidak mungkin menjadi isteri yang sah kepada pihak yang mengaku pada masa percantuman benih anak itu.

Seksyen 116
Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah.

Jika orang yang membuat pengakuan itu adalah seorang perempuan yang berkahwin atau yang sedang dalam 'iddah, suami perempuan itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa kepada orang yang diakui itu melainkan jika pengakuan perempuan itu disahkan oleh suaminya itu atau disahkan dengan keterangan.

Seksyen 117
Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.

Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai bapa atau ibunya, maka pengakuan itu, jika disetujui atau disahkan oleh orang yang diakui itu, sama ada dalam masa hayat atau selepas kematian orang yang mengakui itu, adalah menjadi suatu perkeluargaan yang sah, setakat mana perhubungan di antara bapa atau ibu dengan anak itu sahaja, dengan syarat bahawa memandang kepada umur orang yang membuat pengakuan dan umur orang yang diakui itu maka adalah munasabah orang yang diakui itu menjadi ibu atau bapa kepada orang yang mengakui sedemikian.

Seksyen 118

Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu, atau bapa.

Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai seorang keluarga, selain daripada sebagai seorang anak, ibu, atau bapa, pengakuan itu tidak boleh menyentuh mana-mana orang lain melainkan orang lain itu mengesahkan pengakuan itu.

Seksyen 119

Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Sesudah sahaja pengakuan atau pengesahan dibuat tentang pertalian sebagai bapa dan anak atau tentang perkeluargaan atau persaudaraan, maka pengakuan atau pengesahan itu tidak boleh dibatalkan.

Perintah supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 120

Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya mengikut cara yang dikehendaki oleh Hukum Syara', isteri itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengan isterinya.

Rayuan

Seksyen 121

Rayuan.

[Akta A902] Mana-mana orang yang terkilan dengan mana-mana keputusan mana-mana Mahkamah, atau mana-mana Pendaftar di bawah Akta ini boleh merayu kepada Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 122

[Akta A902] (Dipotong)

BAHAGIAN IX (PENALTI)

Seksyen 123

Poligami tanpa kebenaran Mahkamah

Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum

denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 124

Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.

Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 125

Tidak membuat laporan.

- (1) Jika seseorang berkewajipan membuat sesuatu laporan di bawah Akta ini dan dia bersengaja cuai atau tidak berbuat demikian maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
- (2) Jika seseorang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki mengemukakan sesuatu permohonan di bawah Akta ini atau dikehendaki memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan pendaftaran dokumen itu dan dia bersengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 126

Meninggal langsung isteri.

[Akta A902] Jika seseorang telah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan isterinya dan dia bersengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 127

Menganiaya isteri.

Seseorang yang menganiaya isterinya atau menipu harta isterinya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 128

Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri

Seseorang yang tidak memberi keadilan sewajar kepada isterinya mengikut Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 129

Isteri tidak menurut perintah.

Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikut Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudianya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit.

Seksyen 130

Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan

[Akta A902] Seseorang yang tidak suka akan suami atau isterinya dan dengan perdayaan menjadikan dirinya murtad untuk membatalkan perkahwinannya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum penjara tidak melebihi setahun.

Seksyen 131

Persetubuhan luarnikah antara orang-orang bercerai.

- (1) Seseorang lelaki yang, setelah menceraikan dengan sah isterinya, bersekedudukan semula dengannya tanpa terlebih dahulu melafazkan ruju' yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
- (2) Jika isterinya itu tidak tahu pada masa persekedudukan semula itu tentang telah berlakunya perceraian itu, maka suami itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
- (3) Seseorang perempuan yang bersubahat melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seksyen 132

Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah.

- [Akta A902] (1) Tanpa menjelaskan hak mana-mana orang yang mempunyai kepentingan di bawah mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta ini untuk menguatkuasakan perintah di bawah Akta ini atau di bawah mana-mana undang-undang lain, Mahkamah yang telah membuat perintah itu, dalam hal kegagalan dengan sengaja untuk mematuhi, boleh, jika perintah sedemikian menghendaki pembayaran apa-apa amaun, mengarahkan amaun yang kena dibayar itu dilevi mengikut cara yang diperuntukkan oleh undang-undang bagi melevi denda yang dikenakan oleh Mahkamah atau boleh menjatuhkan hukuman pemenjaraan kepada orang yang dengan sengaja gagal mematuhi jika perintah pembayaran tiap-tiap bulan masih belum dibayar, atau, dalam mana-mana hal yang lain, pembayaran satu tahun yang masih belum dibayar.
- (2) Mahkamah boleh :-
- (a) jika perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) menetapkan bagi pembayaran dibuat secara bulanan, menghukum orang yang dengan

- [Akta A902] (b) sengaja gagal mematuhi dengan pemenjaraan tidak melebihi sebulan bagi setiap bayaran bulanan yang masih belum dibayar; dan dalam mana-mana hal lain, menghukum orang yang dengan sengaja gagal mematuhi perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) dengan pemenjaraan tidak melebihi setahun bagi mana-mana pembayaran yang masih belum dibayar.

Seksyen 133
Percubaan dan subahat.

Barangsiapa cuba melakukan, atau bersubahat melakukan, sesuatu kesalahan di bawah Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman sama seperti yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.

BAHAGIAN X (AM)

Seksyen 134
Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.

- (1) Yang di-Pertuan Agong, atas nasihat Majlis, boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, membuat kaedah-kaedah untuk mengawal amalan dan acara dalam semua perbicaraan hal-ehwal suami-isteri di bawah Akta ini mengikut sebagaimana yang difikirkannya bermanfaat dan kaedah-kaedah untuk menetap dan mengawal fee dan kos yang kena dibayar dalam semua perbicaraan itu; tertakluk kepadanya itu, semua perbicaraan di bawah Akta ini hendaklah dikawal oleh amalan dan acara Mahkamah yang ditetapkan oleh Enakmen Pentadbiran, setakat mana amalan dan acara itu tidak berlawanan dengan Akta ini.
- (2) Mengenai perkara amalan dan acara dalam perbicaraan hal-ehwal suami-isteri yang tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Akta ini atau dalam apa-apa kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta ini atau dalam Enakmen Pentadbiran, Mahkamah boleh memakai apa-apa amalan dan acara yang difikirkannya wajar bagi mengelakkan ketidakadilan dan bagi menyelesaikan perkara-perkara yang dipersoalkan antara pihak-pihak.
- (3) Yang di-Pertuan Agong, atas nasihat Majlis, boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, membuat kaedah-kaedah bagi maksud Akta ini dan, tanpa menyentuh keluasan yang tersebut itu, kaedah-kaedah itu boleh mengadakan peruntukan-peruntukan bagi:
 - (a) cara bagaimana Pendaftar-Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam hendak menjalankan kuasa-kuasa yang diberi kepada mereka oleh Akta ini;
 - (b) bentuk Daftar-Daftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' dan surat-surat perakuan nikah, perceraian, dan ruju' dan cara bagaimana Daftar-Daftar dan surat-surat perakuan dikehendaki disimpan;
 - (c) membekal dan menyimpan dengan selamat Daftar-Daftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju', bukunota-bukunota Pendaftar, dan segala akuan yang dibuat bagi maksud-maksud Akta ini;
 - (d) menyedia dan mengemukakan penyata-penyata perkahwinan, perceraian, dan ruju' yang didaftarkan di bawah Akta ini;

- (e) bentuk apa-apa perakuan, notis, atau lain-lain dokumen yang dikehendaki bagi maksud melaksanakan Akta ini;
- (f) membuat penceraian-penceraian dan memberi salinan-salinan yang diperakui;
- (g) fee yang boleh dikenakan bagi maksud-maksud Akta ini;
- (h) hukuman-hukuman kerana melanggar atau tidak mematuhi mana-mana kaedah yang dibuat di bawah Akta ini; dan
- (i) lain-lain perkara bagi maksud melaksanakan Akta ini.

Seksyen 135

Pemberhentian pemakaian Enakmen Selangor 3/52.

[Akta A828] Bahagian VI, VII, seksyen 155, 156, 158, 159, 160, dan perenggan (n) seksyen 178 Enakmen Pentadbiran adalah dengan ini dimansuhkan dan hendaklah oleh sebab itu terhenti daripada terpakai bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.



Curriculum Vitae



Inneke Wahyu Agustin
19 Agustus 1995
Ds. Kwangsen, Jiwan, Madiun | Jl. Bimokurdo No.13 Sapan
Yogyakarta
Orang tua: Taswi | Anik Rahayu
innekeagustin@gmail.com
085736128480

Riwayat Pendidikan:

- TK Dharma Wanita Kwangsen (2000-2001)
- SD Negeri 2 Kwangsen (2001-2007)
- SMP Negeri 1 Jiwan (2007-2008)
- SMP Negeri 6 Madiun (2008-2010)
- SMA Negeri 6 Madiun (2010-2013)
- UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta (2013-2017)

Seminar and Workshop:

- Seminar Nasional Kepemimpinan Mahasiswa sebagai Buzzer Konstruksi Realitas Media
- Sosialisasi Informasi Geospasial
- Seminar Filsafat dan Budaya
- Pelatihan Kenotariatan
- Seminar Nasional Aksesibilitas Hukum yang Demokratis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Naional
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum PSKH 2015
- Pelatihan Metodologi Penelitian bagi Mahasiswa
- Pelatihan Jurnalistik
- Focus Group Discussion Jaminan Fidusia KEMENKUMHAM Kanwil DIY

Organisasi:

- OSIS SMA N 6 MADIUN
- KOMPASS (Komando Paskibraka SMA N 6 MADIUN)
- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN SUKA

Job Experience:

- Magang Peradilan (Pengadilan Agama Bantul)
- Kepala Bidang Publikasi dan Relasi PSKH UIN Sunan Kalijaga periode 2016/2017.